



# **RENCANA KERJA (RENJA)**

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI GORONTALO  
TAHUN 2018**





**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO**

**Kompleks Blok Plan Perkantoran Pemerintah Provinsi Gorontalo**

Jln. Tayeb Mohammad Gobel, Desa Ayula Utara, Kec. Bulango Selatan, Kab. Bone Bolango

Telp / Fax : (0435) 8523032., email : [dpk.provgorontalo@gmail.com](mailto:dpk.provgorontalo@gmail.com)

## BAB I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi sektor swasta dan masyarakat. Dokumen ini disusun secara bersama dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2018 yang mengambil tema **Pembangunan yang Menyeluruh dan Berkelanjutan**, dan 3 (tiga) prioritas utama, yaitu (1) Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Gorontalo yang Handal, (2) Mewujudkan Sumber Daya Manusia Gorontalo yang Handal, dan (3) Menwujudkan Pemerintahan Daerah Gorontalo yang Amanah.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Gorontalo, dimana Renja Tahun 2018 ini merupakan pelaksanaan program transisi tahun Pertama atau Tahun Rencana Kerja awal Periode RPJMD 2018-2022. Oleh karena itu maka Renja tahun 2018 ini disusun sedemikian rupa sehingga memiliki keterkaitan yang sangat erat dan sangat strategis untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran tahun 2018 yang ditetapkan pada Renstra SKPD. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 ini juga disusun untuk dapat memberikan kontribusi bagi tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan yang ditetapkan secara nasional. Dengan demikian dokumen ini memiliki keterkaitan dan keterpaduan dengan Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan diharapkan sebahagian pendanaannya mendapat dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018, baik melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan (TP), maupun anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Program/kegiatan yang termuat pada Renja Tahun 2018 ini disusun setelah melalui perencanaan yang mendalam, dengan memperhatikan potensi sumberdaya alam perikanan dan kelautan, potensi sumberdaya manusia aparatur dan masyarakat, sarana dan prasarana perikanan dan kelautan yang tersedia, dan hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Program/kegiatan tersebut juga telah melalui pembahasan Forum SKPD Provinsi dan Kab/kota serta kegiatan sinkronisasi program/kegiatan/ tujuan/sasaran dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo Tahun 2018 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting yang ada, evaluasi pelaksanaan Renja pada tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra sebelumnya. Penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Gorontalo tahun 2018 dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yaitu :

1. Tahap perumusan rancangan Renja ; dan
2. Tahap penyajian rancangan Renja .

Tahapan perumusan rancangan Renja SKPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut : (1). Pengolahan data dan informasi; (2) Analisis gambaran pelayanan SKPD; (3). Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu

berdasarkan Renstra SKPD ; (4) Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD; (5). Telaahan terhadap rancangan awal RKPD ; (6). Perumusan tujuan dan sasaran; (7). Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat ; (8). Perumusan kegiatan prioritas; (9). Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD ; (10). Penyempurnaan rancangan Renja SKPD; (11). Pembahasan forum SKPD dan (12). Penyesuaian dokumen rancangan Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah Seperti Rancangan RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2018-2022 , RKPD Pemerintah Provinsi dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Gorontalo 2018-2022, serta rancangan umum kebijakan Kementerian terkait dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Sedangkan tahapan penyajian rancangan Renja SKPD yaitu dengan menyusun Renja berdasarkan sistematika yang sudah ada yaitu berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Sistematika tersebut sebagai berikut :

## **1. Pendahuluan**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

## **2. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD

## **3. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan**

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD
- 3.3. Rencana Program dan Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan

## **4. Penutup**

### **1.2. Landasan Hukum**

Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo Tahun 2018 ini disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- (1). Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo;
- (2). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- (3). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- (4). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- (5). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- (6). Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- (7). Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

- (8). Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- (9). Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- (10). Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
- (11). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- (12). Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017.
- (13). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (14). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- (15). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.06/Men/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2010-2017.
- (16). Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dinas-Dinas Teknis Daerah Provinsi Gorontalo.
- (17). Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017.
- (18). Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo.
- (19). Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo.
- (20). RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2018.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) 2018 Dinas Kelautan dan Perikanan disusun dengan dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

- (1). Merupakan perwujudan RPJMD dan Renstra SKPD pada pelaksanaan program dan kegiatan tahunan ;
- (2). Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program/kegiatan satu (1) tahun kedepan;
- (3). Sebagai bahan pengukuran pencapaian target/sasaran dan kinerja per program/kegiatan tahunan ;
- (4). Sebagai bahan evaluasi keseluruhan terhadap pelaksanaan program/kegiatan tahunan ;
- (5). Sebagai bahan acuan untuk perencanaan tahun berikutnya.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo tahun 2018 disusun secara sistematis dan mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, yang berisikan :

- (1). Pendahuluan, Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan. Pada bagian ini dijelaskan :
  - Mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD;
  - Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
  - Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya tentang kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.
  - Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.
  - Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.
  
- (2). Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tahun Lalu dan dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, dan Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD, memuat penjelasan tentang :
  - Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) ;
  - Penjelasan yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD yang didasarkan pada realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya ;
  - Penjelasan capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi.
  - Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan.
  
- (3). Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang terdiri dari Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja SKPD, dan Rencana Program dan Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan. Pada bab ini memuat penjelasan tentang :
  - Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
  - Penjelasan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.
  - Sedangkan untuk Rencana Program/kegiatan berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misalnya
    - a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
    - b. Pengaruh program terhadap pertumbuhan ekonomi daerah
    - c. Pengentasan kemiskinan,
    - d. Pencapaian SPM,
    - e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,

- f. Pengembangan daerah terisolir,
- Memuat uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yang meliputi Jumlah program dan jumlah kegiatan, sebaran lokasi program dan kegiatan, dan Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.  
Dan keseluruhan penjelasan tersebut tertuang dalam tabel rencana program.

(4). Penutup. Pada bab ini berisikan uraian berupa :

- Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- Menjelaskan Kaidah-kaidah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Renja SKPD, Penegasan komitmen SKPD terhadap pelaksanaan Renstra SKPD dan RPJMD 2018-2022 serta penegasan Renja SKPD sebagai acuan penyusunan RKA pada tahun rencana.
- Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

## BAB II.

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.

##### 2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016

Dalam pelaksanaan rencana kerja program/kegiatan Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo pada tahun 2016 dilakukan dengan beberapa strategi. **Strategi pertama** yang ditempuh adalah melaksanakan koordinasi dan integrasi perencanaan program/kegiatan antara Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan dan perikanan RI dengan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota. **Strategi Kedua** : Mengoptimalkan anggaran APBN dan APBD pada program-program prioritas baik yang bersifat fisik maupun non fisik. **Strategi Ketiga** : Kerjasama antar berbagai stakeholder perikanan dan **Strategi Keempat** adalah melaksanakan program/kegiatan tepat waktu.

#### A. Penjelasan Pelaksanaan Anggaran APBD TA. 2016 Sektor Perikanan Dan Kelautan Provinsi Gorontalo

Dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan pelaksanaan pembangunan Perikanan dan Kelautan di Provinsi Gorontalo Tahun 2016, Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan beberapa program dan kegiatan APBD. Program/kegiatan tersebut yaitu :

##### 1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur

- Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
- Peningkatan SDM Aparatur

Program dan ketiga kegiatan ini merupakan program/kegiatan untuk menunjang kegiatan administrasi perkantoran, peningkatan pelayanan publik, peningkatan sarana dan prasarana perkantoran serta untuk peningkatan sumberdaya manusia dibidang perencanaan, kepegawaian, pengelolaan aset, pengelolaan keuangan dan peningkatan kapasitas teknis di bidang perikanan dan kelautan.

##### 2. Program Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

- Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi

Program dan kegiatan ini merupakan program/kegiatan untuk menunjang kegiatan perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan dinas, baik di lingkungan sekretariat maupun di lingkungan Bidang dan UPTD. Hasil yang didapat pada program dan kegiatan ini adalah (a). Laporan perencanaan (RKPD, Renja dan RKA) ; (b). Laporan Monitoring (laporan perkembangan pelaksanaan program/kegiatan perikanan dan kelautan tahun berjalan) ; (c), Laporan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan perikanan dan kelautan (laporan monev bulanan, triwulan dan tahunan, laporan LPPD, laporan LKPJ, Laporan Lakip dan Laporan Tahunan)



**3. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (UPTD-BPPMHP)**

- Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-BPPMHP)
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD-BPPMHP)

Program dan kedua kegiatan ini merupakan program/kegiatan untuk menunjang kegiatan administrasi perkantoran, peningkatan pelayanan publik, peningkatan sarana dan prasarana perkantoran khususnya di UPTD- BPPMHP (Balan Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan).

**4. Program Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan**

- Penguatan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Program dan kegiatan ini adalah merupakan kegiatan operasional monitoring, evaluasi dan pengujian mutu hasil perikanan di UPTD-BPPMHP

**5. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (UPTD-TMB)**

- Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-TMB)
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD- TMB)

Program dan kedua kegiatan ini merupakan program/kegiatan untuk menunjang kegiatan administrasi perkantoran, peningkatan pelayanan publik, peningkatan sarana dan prasarana perkantoran khususnya di UPTD- TMB (Taksi Mina Bahari)

**6. Program Pelayanan Sarana Produksi Perikanan**

- Penyediaan dan Pelayanan Sarana Produksi Perikanan (UPTD-TMB)

Program/kegiatan ini adalah kegiatan operasional UPTD-Taksi Mina Bahari khususnya dalam penyediaan dan pelayanan sarana produksi perikanan.

**7. Program pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Taksi Mina Bahari**

- Rencana Bisnis dan Anggaran Unit Pelaksana Teknis Dinas (Taksi Mina Bahari)

Program/kegiatan RBA UPTD Taksi Mina Bahari adalah merupakan sebuah program/kegiatan operasional UPTD TMB

**8. Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (UPTD-BPBIAT)**

- Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-BPBIAT)
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD-BPBIAT)
- Pengembangan Calon Induk dan Benih Ikan Unggu

Program dan ketiga kegiatan ini merupakan program/kegiatan untuk menunjang kegiatan administrasi perkantoran, peningkatan pelayanan publik, peningkatan sarana dan prasarana perkantoran khususnya di UPTD- BPBIAT (Balai Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar).

### **9. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir**

- Pengembangan Desa Nelayan Tangguh (PDNT)  
Kegiatan PDNT adalah kegiatan yang menunjang peningkatan kehidupan nelayan di desa nelayan/desa pesisir melalui penyediaan sarana produksi perikanan (perahu nelayan dan alat tangkap) serta bantuan waserda bagi perempuan pesisir.
- Konservasi, Rehabilitasi dan Pengembangan Usaha Garam Rakyat  
Kegiatan ini adalah kegiatan rehabilitasi demi terwujudnya keseimbangan pemanfaatan sumberdaya alam, produksi dan daya dukung lingkungan serta untuk pencapaian pengembangan usaha garam rakyat (PUGAR)

### **10. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan**

- Pemeliharaan Kapal Pengawas dan Speed Pengawas
  - Pelayanan Administrasi P2SDKP Kapal Pengawas Tenggiri dan Speed Pengawas
- Program dan kegiatan ini merupakan kegiatan operasional pengawasan sumberdaya ikan, peningkatan pelayanan publik, khususnya aduan masyarakat terkait kegiatan ilegal fishing dan serta perawatan dan pemeliharaan kapal pengawas.

### **11. Program Pengembangan Perikanan Budidaya**

- Pembinaan Dan Pengembangan Budi Daya Air Payau
- Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar
- Pengembangan Kawasan Budidaya Laut

Program pengembangan Perikanan Budidaya dan tiga kegiatan di dalamnya adalah program/kegiatan yang menunjang peningkatan (1). Produksi budidaya perikanan air payau (udang dan bandeng) ; (2),. Peningkatan Produksi budidaya Perikanan Air Tawar (ikan nila, lele, patin, dan mas) ; (3). Peningkatan produksi perikanan laut (rumpun laut, kerapu, kakap, dll). (4). untuk menunjang peningkatan pendapatan pembudidaya.

Ketiga Kegiatan tersebut, difokuskan untuk penyediaan sarana produksi perikanan budidaya, kegiatan pembinaan kelompok pembudidaya, dan kegiatan operasional dilapangan.

### **12. Program Pengembangan Perikanan Tangkap**

- Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
- Penyediaan Sarana Perikanan Tangkap (DAK)

Program pengembangan Perikanan Tangkap dan dua kegiatan di dalamnya adalah program/kegiatan yang menunjang (1). Peningkatan produksi perikanan tangkap (Ikan tuna, tongkol, cakalang, selar dan komoditas hasil laut lainnya) ; (2) Untuk menunjang peningkatan pendapatan nelayan ; (3). Untuk menunjang peningkatan Nilai Tukar Nelayan (NTN).

Kedua Kegiatan tersebut, difokuskan untuk penyediaan sarana produksi perikanan tangkap (kapal ikan 10 – 30 GT, mesin kapal (Katiting dan mesin tempel), alat tangkap (pukat porseseine dll) dan alat bantu penangkapan (rumpon), kegiatan pembinaan kelompok nelayan , dan kegiatan operasional dilapangan.

### **13. Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan**

- Peningkatan Keterampilan dan Pengetahuan Pelaku Usaha Perikanan Tangkap
- Desiminasi Teknologi Pelatihan Pembuatan Perahu Fiberglass

Program pengembangan sumberdaya Perikanan yang terdiri dari dua kegiatan adalah program/kegiatan yang fokus pada peningkatan ketrampilan dan pengetahuan usaha perikanan tangkap melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis serta alih teknologi atau memberikan pelatihan pembuatan perahu fiberglass bagi nelayan.

#### **14. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan**

- Pengembangan Sentra Pengolahan Hasil Perikanan
- Penguatan Sistem Informasi Pasar
- Promosi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMAR IKAN)

Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan yang terdiri dari tiga kegiatan adalah merupakan program/kegiatan yang fokus pada : (1). Pengembangan sentra pengolahan hasil perikanan ; (2). Penguatan dan publikasi informasi pasar hasil perikanan dan ; (3). Gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemar Ikan) bagi anak-anak sekolah melalui kegiatan promosi dan event kegiatan lainnya.

Alokasi Anggaran APBD TA. 2016 Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo sejumlah Rp. 36.510.556.842,00,- yang terdiri dari Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. . 10.444.736.842,00,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 26.065.820.000,00,-. Dari total anggaran belanja tersebut, Realisasi keuangan dan fisik sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 yaitu: (1). Realisasi Keuangan sebesar 94,86 % dan Realisasi Fisik 99,02 %.

Sedangkan untuk masing-masing belanja, untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) Realisasi keuangan dan fisik sampai posisi tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut : (1), Realisasi keuangan 99,99 % dan; (2) Realisasi fisik 100 %. Dan untuk Belanja Langsung (BL) : (1) Realisasi keuangan 92,80 % dan realisasi fisik 98,63 %.

Khusus rincian alokasi anggaran Belanja Langsung (BL) realisasi keuangan dan fisik pada masing-masing program dan kegiatan sebagaimana terlampir pada Tabel 1 :

**Tabel I**  
**Realisasi Fisik & Keuangan Belanja Langsung**  
**Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo**  
**Tahun 2016**

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		FISIK
		TOTAL	%	%
<b>Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur</b>	<b>2,801,302,000</b>	<b>2,589,949,267</b>	<b>92,46</b>	<b>99,48</b>
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	1,208,259,500	1,122,088,407	92,85	99,91
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	1,441,022,500	1,326,683,060	92,07	98,53
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi)	151,750,000	141,177,800	93,03	100,00
<b>Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan</b>	<b>852,350,000</b>	<b>787,995,512</b>	<b>92,45</b>	<b>99,04</b>
Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	702,350,000	645,363,512	91,89	98,08
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan	150,000,000	142,632,000	95,09	100
<b>SEKRETARIS DINAS</b>	<b>3,653,652,000</b>	<b>3,377,944,779</b>	<b>92,45</b>	<b>99,02</b>
<b>Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (UPTD-LPPMHP)</b>	<b>268,358,000</b>	<b>252,692,477</b>	<b>94,16</b>	<b>99,55</b>
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-LPPMHP)	154,640,000	139,199,783	90,02	99,09
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD-LPPMHP)	113,718,000	113,492,694	99,80	100,00
<b>Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan</b>	<b>272,809,000</b>	<b>264,645,310</b>	<b>97,01</b>	<b>99,32</b>
Penguatan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	272,809,000	264,645,310	97,01	99,32
<b>UPTD-LPPMHP</b>	<b>541,167,000</b>	<b>517,337,787</b>	<b>95,60</b>	<b>99,40</b>
<b>Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (UPTD-TMB)</b>	<b>376,320,000</b>	<b>339,687,566</b>	<b>90,27</b>	<b>99,33</b>
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-TMB)	305,670,000	274,085,678	89,67	100,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD-TMB)	70,650,000	65,601,888	92,85	98,65
<b>Program Pelayanan Sarana Produksi Perikanan</b>	<b>214,200,000</b>	<b>212,888,000</b>	<b>99,39</b>	<b>100,00</b>
Penyediaan dan Pelayanan Sarana Produksi Perikanan (UPTD-TMB)	214,200,000	212,888,000	99,39	100,00
<b>Program pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Taksu Mina Bahari</b>	<b>425,000,000</b>	<b>370,550,326</b>	<b>87,19</b>	<b>98,98</b>
Rencana Bisnis dan Anggaran Unit Pelaksana Teknis Dinas (Taksu Mina Bahari)	425,000,000	370,550,326	87,19	98,98
<b>UPTD-TMB</b>	<b>1,015,520,000</b>	<b>923,125,892</b>	<b>90,90</b>	<b>99,48</b>
<b>Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (UPTD-BPBIAT)</b>	<b>452,120,000</b>	<b>436,935,308</b>	<b>96,64</b>	<b>100,00</b>
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-BPBIAT)	391,900,000	382,177,558	97,52	100,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD-BPBIAT)	60,220,000	54,757,750	90,93	100,00
<b>Peningkatan Produksi dan Pelayanan Teknis</b>	<b>206,890,000</b>	<b>158,614,532</b>	<b>76,67</b>	<b>87,75</b>
Pengembangan Calon Induk dan Benih Ikan Unggul	206,890,000	158,614,532	76,67	87,75
<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (DAK)</b>	<b>1,444,000,000</b>	<b>1,346,897,000</b>	<b>93,28</b>	<b>100,00</b>

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran UPTD-BPBIAT (DAK)	1,444,000,000	1,346,987,000	93,28	100,00
<b>UPTD-BPBIAT</b>	<b>2,103,010,000</b>	<b>1,942,446,840</b>	<b>92,37</b>	<b>98,79</b>
<b>Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (UPTD-BPBILP)</b>	<b>403,775,000</b>	<b>328,302,579</b>	<b>81,31</b>	<b>99,96</b>
PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		FISIK
		%	%	%
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-BPBILP)	311,715,000	244,320,829	78,38	99,91
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD-BPBILP)	92,060,000	83,981,750	91,23	100,00
<b>Peningkatan Produksi dan Pelayanan Teknis</b>	<b>507,550,000</b>	<b>501,793,500</b>	<b>98,87</b>	<b>100,00</b>
Peningkatan Produksi Benih Unggul (UPTD-BBILP)	507,550,000	501,793,500	98,87	100,00
<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (DAK)</b>	<b>2,530,000,000</b>	<b>2,345,318,000</b>	<b>92,70</b>	<b>100,00</b>
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran UPTD-BPBILP (DAK)	2,530,000,000	2,345,318,000	92,70	100,00
<b>UPTD-BPBILP</b>	<b>3,441,325,000</b>	<b>3,175,414,079</b>	<b>92,27</b>	<b>99,99</b>
<b>Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir</b>	<b>1,032,305,000</b>	<b>814,196,000</b>	<b>78,87</b>	<b>80,45</b>
Pengembangan Desa Nelayan Tangguh (PDNT)	99,470,000	91,150,000	91,64	100,00
Konservasi, Rehabilitasi dan Pengembangan Usaha Garam Rakyat	348,755,000	143,686,000	41,20	41,36
Pengembangan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	584,080,000	579,360,000	99,19	100,00
<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan</b>	<b>498,752,000</b>	<b>371,512,514</b>	<b>74,49</b>	<b>87,17</b>
Pemeliharaan Kapal Pengawas dan Speed Pengawas	87,700,000	58,300,000	97,63	74,34
Pelayanan Administrasi P2SDKP Kapal Pengawas Tenggiri dan Speed Pengawas	411,052,000	313,212,514	76,20	100,00
<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (DAK)</b>	<b>459,820,000</b>	<b>422,500,000</b>	<b>91,88</b>	<b>100,00</b>
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (DAK)	459,820,000	422,500,000	91,88	100,00
<b>BIDANG KELAUTAN DAN PESISIR</b>	<b>1,990,877,000</b>	<b>1,608,208,514</b>	<b>80,78</b>	<b>88,60</b>
<b>Program Pengembangan Budidaya Perikanan</b>	<b>3,489,208,000</b>	<b>3,440,835,900</b>	<b>98,61</b>	<b>100,00</b>
Pembinaan Dan Pengembangan Budi Daya Air Payau	1,734,258,000	1,709,578,400	98,58	100,00
Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar	806,820,000	796,992,000	98,78	100,00
Pengembangan Kawasan Budidaya Laut	948,130,000	934,265,500	98,54	100,00
<b>BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>3,489,208,000</b>	<b>3,440,835,900</b>	<b>98,61</b>	<b>100,00</b>
<b>Program Pengembangan Perikanan Tangkap</b>	<b>6,464,951,000</b>	<b>6,119,615,616</b>	<b>94,66</b>	<b>99,52</b>
Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	5,609,700,000	5,557,001,108	99,06	99,43
Peningkatan Keterampilan dan Pengetahuan Pelaku Usaha Perikanan Tangkap	855,251,000	562,614,508	65,78	99,12
<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (DAK)</b>	<b>220,000,000</b>	<b>207,946,000</b>	<b>94,52</b>	<b>100,00</b>
Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (DAK)	220,000,000	207,946,000	94,52	100,00
<b>BIDANG PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>6,684,951,000</b>	<b>6,327,561,616</b>	<b>94,65</b>	<b>99,41</b>
<b>Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan</b>	<b>3,146,110,000</b>	<b>2,874,971,959</b>	<b>91,38</b>	<b>94,55</b>
Pengembangan Sentra Pengolahan Hasil Perikanan	153,940,000	149,219,459	96,93	100,00
Penguatan Sistem Informasi Pasar	71,035,000	45,740,000	64,39	78,42
Promosi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMAR IKAN)	2,894,415,000	2,654,142,500	91,70	99,77

Pengembangan Peluang Usaha dan Investasi Pasca Panen	26,720,000	25,870,000	96,82	100,00
<b>BIDANG PEMASARAN DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>3,146,110,000</b>	<b>2,874,971,959</b>	<b>91,38</b>	<b>99,30</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>26,065,820,000</b>	<b>24,187,847,366</b>	<b>92,83</b>	<b>98,63</b>

## B. Permasalahan dan Solusi

Dari Pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo sumber anggaran APBD TA. 2016, semuanya bisa berjalan dengan baik, tetapi ada beberapa program/kegiatan yang pencapaiannya di bawah 90 %. Beberapa program tersebut dapat dilihat pada tabel Tabel 4.145. Penyerapan anggaran < dari 90 % disebabkan oleh :

1. Pengembangan Calon Induk dan Benih Ikan Unggul (UPTD BPBIAT), Realisasi Keuangan 76,67% Penyerapan keuangan di bawah 90% untuk kegiatan ini adalah karena adanya edaran efisiensi anggaran perjalanan dinas oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo di akhir Tahun anggaran sehingga sisa anggaran perjalanann dinas pada UPTD BPBIAT Tidak digunakan.
2. Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-BPBILP), realisasi keuangan 78,38% Penyerapan keuangan di bawah 90% untuk kegiatan ini adalah karena kegiatan sudah dilaksanakan sepenuhnya dengan realisasi Fisik mencapai 99,91% dimana sisa anggaran merupakan efisiensi dari pelaksanaan pekerjaan.
3. Konservasi, Rehabilitasi dan Pengembangan Usaha Garam Rakyat, dimana realisasi keuangan hanya 41,20%. Penyerapan anggaran di bawah 90 % ini disebabkan oleh adanya efisiensi anggaran oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo pada Bulan Oktober 2016.
4. Pelayanan Administrasi P2SDKP Kapal Pengawas Tenggiri dan Speed Pengawas, dimana realisasi keuangan hanya 76,20%. Tidak tercapainya realisasi keuangan tersebut dipengaruhi oleh adanya efisiensi anggaran oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dimana berpengaruh pada tidak terserapnya alokasi belanja perjalanan dinas dan Operasional BBM Kapal Pengawas.
5. Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-TMB), realisasi keuangan 89,67 % Penyerapan keuangan di bawah 90% dipengaruhi oleh sebagian kegiatan ini merupakan belanja rutin yang disesuaikan dengan biaya pengeluaran riil diantaranya Belanja Honor Kegiatan, Belanja Air, Listrik, Biaya Internet dan Belanja Makanan/Minuman Tamu dan tidak terserapnya anggaran kajian pengalihan alih status UPTD TMB menjadi UPTD pelabuhan.
6. Rencana Bisnis Anggaran (RBA) (UPTD-TMB), realisasi keuangan 87,19 % Penyerapan keuangan di bawah 90%, hal ini dikarenakan adanya sisa anggaran pada belanja Listrik, Air, dan belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah. Adapun realisasi Fisik sebesar 98,98 %.
7. Peningkatan Keterampilan dan Pengetahuan Pelaku Usaha Perikanan Tangkap realisasi keuangan 65,78 % Penyerapan keuangan di bawah 90%. Hal ini dipengaruhi oleh adanya efisiensi / Penghematan anggaran (Self Blocking) oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo, dimana alokasi belanja yang tidak dapat direalisasikan adalah Belanja Perjalanan Dinas, Belanja bahan percontohan, Belanja operasional BBM, dll.
8. Penguatan Sistem Informasi Pasar realisasi keuangan 64,39 % Penyerapan keuangan

di bawah 90%. Hal ini dipengaruhi oleh adanya efisiensi / Penghematan anggaran (Self Blocking) oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dimana alokasi belanja yang tidak dapat direalisasikan adalah Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Peliputan kegiatan.

### **C. Hal-Hal Lain Yang Perlu Dilaporkan**

1. Data Capaian Kinerja Program/Kegiatan Berdasarkan Jenis Urusan yang menjadi Kewenangan Daerah. Data capaian kinerja program berdasarkan jenis urusan baik wajib dan pilihan sesuai SKPD yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo tahun 2016 yang merupakan bagian dari urusan pilihan. Berdasarkan perbandingan data capaian/realisasi keuangan maupun fisik tahun 2016 dan 2015, memperlihatkan bahwa tahun 2016 realisasi keuangan dan fisik belum begitu baik dari tahun 2015. Dimana untuk realisasi keuangan tahun 2016 sebesar 92,80 % sedangkan untuk tahun 2015 realisasi keuangan hanya 92,91 %. Untuk realisasi fisik pada tahun 2016 sebesar 98,63 % dan tahun 2015 sebesar 99,58 %.



**Tabel 2.**  
**Data Capaian Kinerja Program Berdasarkan Urusan Perikanan dan Kelautan**  
**(Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo) Perbandingan Capaian Tahun 2015 dan Tahun 2016**

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2016	TAHUN 2016			TAHUN 2015		
		REALISASI KEUANGAN		FISIK	REALISASI KEUANGAN		FISIK
		TOTAL	%	%	TOTAL	%	%
<b>Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur</b>	<b>2,801,302,000</b>	<b>2,589,949,267</b>	<b>92,46</b>	<b>99,48</b>	<b>2,906,786,743</b>	<b>98.40</b>	<b>100.00</b>
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	1,208,259,500	1,122,088,407	92,85	99,91	703,104,997	96.93	100.00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	1,441,022,500	1,326,683,060	92,07	98,53	2,049,648,746	98.79	100.00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi)	151,750,000	141,177,800	93,03	100.00	154,033,000	99.98	100.00
<b>Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan</b>	<b>852,350,000</b>	<b>787,995,512</b>	<b>92,45</b>	<b>99,04</b>	<b>588,852,870</b>	<b>99.14</b>	<b>100.00</b>
Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	702,350,000	645,363,512	91,89	98,08	488,192,870	98.97	100.00
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan	150,000,000	142,632,000	95,09	100	100,660,000	100.00	100.00
<b>SEKRETARIS DINAS</b>	<b>3,653,652,000</b>	<b>3,377,944,779</b>	<b>92,45</b>	<b>99,02</b>	<b>3,495,639,613</b>	<b>98.52</b>	<b>100.00</b>
<b>Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (UPTD-LPPMHP)</b>	<b>268,358,000</b>	<b>252,692,477</b>	<b>94,16</b>	<b>99,55</b>	<b>211,929,916</b>	<b>91.46</b>	<b>100.00</b>
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-LPPMHP)	154,640,000	139,199,783	90,02	99,09	137,119,366	88.11	100.00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD-LPPMHP)	113,718,000	113,492,694	99,80	100.00	74,810,550	98.32	100.00
<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (DAK)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>574,650,000</b>	<b>82.68</b>	<b>100.00</b>
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran UPTD-BPPMHP (DAK)	-	-	-	-	82.68	100.00	-
<b>Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan</b>	<b>272,809,000</b>	<b>264,645,310</b>	<b>97,01</b>	<b>99,32</b>	<b>182,065,516</b>	<b>89.51</b>	<b>93.99</b>
Penguatan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	272,809,000	264,645,310	97,01	99,32	89.51	93.99	100.00
<b>UPTD-LPPMHP</b>	<b>541,167,000</b>	<b>517,337,787</b>	<b>95,60</b>	<b>99,40</b>	<b>968,645,432</b>	<b>85.71</b>	<b>98.92</b>



PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2016	TAHUN 2016			TAHUN 2015		
		REALISASI KEUANGAN		FISIK	REALISASI KEUANGAN		FISIK
Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (UPTD-TMB)	376,320,000	339,687,566	90,27	99,33	398,547,010	80.23	99.70
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-TMB)	305,670,000	274,085,678	89,67	100.00	378,437,680	79.75	99.69
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD-TMB)	70,650,000	65,601,888	92,85	98,65	20,109,330	90.57	100.00
Program Pelayanan Sarana Produksi Perikanan	214,200,000	212,888,000	99,39	100.00	181,604,300	94.19	98.90
Penyediaan dan Pelayanan Sarana Produksi Perikanan (UPTD-TMB)	214,200,000	212,888,000	99,39	100.00	181,604,300	94.19	98.90
Program pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Taksi Mina Bahari	425,000,000	370,550,326	87,19	98,98	315,723,049	46.43	100.00
Rencana Bisnis dan Anggaran Unit Pelaksana Teknis Dinas (Taksi Mina Bahari)	425,000,000	370,550,326	87,19	98,98	315,723,049	46.43	100.00
UPTD-TMB	1,015,520,000	923,125,892	90,90	99,48	895,874,359	65.41	99.74
Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (UPTD-BPBIAT)	452,120,000	436,935,308	96,64	100.00	387,292,256	95.72	100.00
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-BPBIAT)	391,900,000	382,177,558	97,52	100.00	340,456,506	95.29	100.00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD-BPBIAT)	60,220,000	54,757,750	90,93	100.00	46,835,750	98.91	100.00
Peningkatan Produksi dan Pelayanan Teknis	206,890,000	158,614,532	76,67	87,75	240,447,900	95.55	100.00
Pengembangan Calon Induk dan Benih Ikan Unggul	206,890,000	158,614,532	76,67	87,75	240,447,900	95.55	100.00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (DAK)	1,444,000,000	1,346,897,000	93,28	100.00	2,234,256,000	95.34	100.00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran UPTD-BPBIAT (DAK)	1,444,000,000	1,346,987,000	93,28	100.00	2,234,256,000	95.34	100.00
UPTD-BPBIAT	2,103,010,000	1,942,446,840	92,37	98,79	2,861,996,156	95.41	100.00
Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur (UPTD-BPBILP)	403,775,000	328,302,579	81,31	99,96	383,030,259	97.76	100.00
Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD-BPBILP)	311,715,000	244,320,829	78,38	99,91	285,727,259	97.33	100.00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD-BPBILP)	92,060,000	83,981,750	91,23	100.00	97,303,000	99.06	100.00
Peningkatan Produksi dan Pelayanan Teknis	507,550,000	501,793,500	98,87	100.00	452,149,325	82.39	94.75
Peningkatan Produksi Benih Unggul (UPTD-BBILP)	507,550,000	501,793,500	98,87	100.00	452,149,325	82.39	94.75

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2016	TAHUN 2016			TAHUN 2015		
		REALISASI KEUANGAN		FISIK	REALISASI KEUANGAN		FISIK
<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (DAK)</b>	<b>2,530,000,000</b>	<b>2,345,318,000</b>	<b>92,70</b>	<b>100.00</b>	<b>2,423,556,400</b>	<b>95.04</b>	<b>100.00</b>
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran UPTD-BPBILP (DAK)	2,530,000,000	2,345,318,000	92,70	100.00	2,423,556,400	95.04	100.00
<b>UPTD-BPBILP</b>	<b>3,441,325,000</b>	<b>3,175,414,079</b>	<b>92,27</b>	<b>99,99</b>	<b>3,258,735,984</b>	<b>93.36</b>	<b>99.17</b>
<b>Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir</b>	<b>1,032,305,000</b>	<b>814,196,000</b>	<b>78,87</b>	<b>80,45</b>	<b>2,942,987,300</b>	<b>94.10</b>	<b>100.00</b>
Pengembangan Desa Nelayan Tangguh (PDNT)	99,470,000	91,150,000	91,64	100.00	2,391,921,000	94.12	100.00
Konservasi, Rehabilitasi dan Pengembangan Usaha Garam Rakyat	348,755,000	143,686,000	41,20	41,36	551,066,300	94.01	100.00
Pengembangan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	584,080,000	579,360,000	99,19	100.00	-	-	-
<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan</b>	<b>498,752,000</b>	<b>371,512,514</b>	<b>74,49</b>	<b>87,17</b>	<b>321,857,500</b>	<b>98.87</b>	<b>100.00</b>
Pemeliharaan Kapal Pengawas dan Speed Pengawas	87,700,000	58,300,000	97.63	74,34	55,530,000	97.63	100.00
Pelayanan Administrasi P2SDKP Kapal Pengawas Tenggiri dan Speed Pengawas	411,052,000	313,212,514	76,20	100.00	266,327,500	99.14	100.00
<b>BIDANG KELAUTAN DAN PESISIR</b>	<b>1,990,877,000</b>	<b>1,608,208,514</b>	<b>80,78</b>	<b>88,60</b>	<b>3,264,844,800</b>	<b>94.55</b>	<b>100.00</b>
<b>Program Pengembangan Budidaya Perikanan</b>	<b>3,489,208,000</b>	<b>3,440,835,900</b>	<b>98,61</b>	<b>100.00</b>	<b>2,376,069,800</b>	<b>98.94</b>	<b>100.00</b>
Pembinaan Dan Pengembangan Budi Daya Air Payau	1,734,258,000	1,709,578,400	98,58	100.00	654,334,300	97.20	100.00
Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar	806,820,000	796,992,000	98,78	100.00	706,914,500	99.52	100.00
Pengembangan Kawasan Budidaya Laut	948,130,000	934,265,500	98,54	100.00	1,014,821,000	99.69	100.00
<b>BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA</b>					<b>2,376,069,800</b>	<b>98.94</b>	<b>100.00</b>
<b>Program Pengembangan Perikanan Tangkap</b>	<b>6,464,951,000</b>	<b>6,119,615,616</b>	<b>94,66</b>	<b>99,52</b>	<b>2,086,929,700</b>	<b>91.29</b>	<b>97.81</b>
Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	5,609,700,000	5,557,001,108	99,06	99,43	1,909,136,100	92.82	97.57
Penyediaan Sarana Perikanan Tangkap (DAK)	220,000,000	207,946,000	94,52	100.00	-	-	-
Peningkatan Keterampilan dan Pengetahuan Pelaku Usaha Perikanan Tangkap	855,251,000	562,614,508	65,78	99,12	177,793,600	77.58	100.00
Desiminasi Teknologi Pelatihan Pembuatan Perahu Fiberglass	-	-	-	-	-	-	-

<b>BIDANG PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>6,684,951,000</b>	<b>6,327,561,616</b>	<b>94,65</b>	<b>99,41</b>	<b>2,086,929,700</b>	<b>91.29</b>	<b>97.81</b>
PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2016	TAHUN 2016			TAHUN 2015		
		REALISASI KEUANGAN	FISIK		REALISASI KEUANGAN	FISIK	
<b>Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan</b>	<b>3,146,110,000</b>	<b>2,874,971,959</b>	<b>91,38</b>	<b>94,55</b>	<b>1,474,294,722</b>	<b>93.13</b>	<b>100.00</b>
Pengembangan Sentra Pengolahan Hasil Perikanan	153,940,000	149,219,459	96,93	100.00	496,064,300	91.30	100.00
Penguatan Sistem Informasi Pasar	71,035,000	45,740,000	64,39	78,42	723,963,100	95.77	100.00
Promosi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMAR IKAN)	2,894,415,000	2,654,142,500	91,70	99,77	254,267,322	89.57	100.00
Pengembangan Peluang Usaha dan Investasi Pasca Panen	26,720,000	25,870,000	96,82	100.00	-	-	-
<b>BIDANG PEMASARAN DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>3,146,110,000</b>	<b>2,874,971,959</b>	<b>91,38</b>	<b>99,30</b>	<b>1,474,294,722</b>	<b>93.13</b>	<b>100.00</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>26,065,820,000</b>	<b>24,187,847,366</b>	<b>92,80</b>	<b>98,63</b>	<b>20,683,030,566</b>	<b>92,91</b>	<b>99.57</b>

**D. Penjelasan Umum Capaian Target Dan Fokus Kinerja Pembangunan Sektor Perikanan Dan Kelautan Di Provinsi Gorontalo Sesuai Dengan RPJMD 2012-2017.**

**Tujuan Dan Sasaran Pelaksanaan Program Perikanan dan Kelautan 2016**

Tujuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo secara umum adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan yang berdaya saing, meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan dan pedagang ikan, serta memperluas akses pasar ;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana perikanan dan kelautan yang berdaya saing, mengoptimalkan Balai Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar (BPBIAT), Balai Pengembangan Budidaya Ikan Laut dan Pantai (BPBILP), Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP), Unit Pengolahan Ikan (UPI), dan Taksi Mina Bahari (TMB).
3. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan melalui program pemulihan/pengkayaan sumberdaya ikan, rehabilitasi dan konservasi laut pesisir dan pulau-pulau kecil.
4. Meningkatkan kualitas SDM perikanan dan kelautan yang berbasis penerapan IPTEK dan daya saing.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan perkantoran / pelayanan publik bidang perikanan dan kelautan.

Sedangkan sasaran atau target utama program/kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo secara umum tahun 2016 adalah sebagai berikut

1. Peningkatan produksi ikan hasil perikanan tangkap hingga mencapai 114.578 ton pada tahun 2016.
2. Peningkatan produksi perikanan budidaya hingga mencapai 186.490 ton pada tahun 2016.
3. Peningkatan pendapatan rata-rata nelayan hingga mencapai Rp. 2.648.545,- per bulan pada tahun 2016.
4. Peningkatan pendapatan rata-rata pembudidaya ikan hingga mencapai Rp. 2.278.085,- per bulan pada tahun 2016.
5. Peningkatan pendapatan rata-rata Pengolah dan Pemasar ikan hingga mencapai Rp. 3.401.204,- per bulan pada tahun 2016.
6. Peningkatan produksi perikanan bagi kelompok usaha perikanan (nelayan dan pembudidaya) mencapai 110.807 ton pada tahun 2016.
7. Peningkatan konsumsi ikan masyarakat 55 kg/kapita/tahun pada tahun 2016.
8. Peningkatan cakupan binaan kelompok nelayan/pembudidaya 630 kelompok pada tahun 2016.
9. Peningkatan desa nelayan menjadi desa nelayan tangguh melalui program PDNT 16 desa nelayan hingga tahun 2015.
10. Peningkatan Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya (NTN-P) menjadi 108,41 pada tahun 2016.

**Capaian Yang Menjadi Indikator Kinerja Utama  
Sektor Perikanan dan Kelautan Sesuai RPJMD dan Renstra Tahun 2016**

No.	Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	TAHUN 2016		
		Target	Capaian **	% Capaian
<b>1.</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>			
1.1	Produksi perikanan Tangkap (ton)	114.578	115.873	101,13
1.2	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	186.490	100.245	53,75
	- Produksi Ikan Budidaya (Ton)	37.298	38.295	102,67
	- Produksi rumput laut (Ton)	149.192	61.950	41,52
	Total Produksi (Tangkap + Budidaya) (Ton)	301.068	215.918	71,71
1.3	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan/ pembudidaya (Ton)	110.807	110.250	99,49
1.4	Konsumsi ikan (kg/kap/thn)	55	55,7	101,27
1.5	Cakupan bina kelompok Perikanan (kelompok)	630	630	100,00
1.6	Pendapatan Nelayan (Rp/bln)	2.648.545	2.700.000	101,94
1.7	Pendapatan pembudidaya (Rp/bln)	2.278.085	2.500.000	109,74
1.8	Pendapatan pengolah dan pemasar perikanan (Rp./Bln)	3.401.204	3.400.000	99,96
1.9	Desa Nelayan/PEsisir yang Menjadi Desa Tangguh /PDNT (Desa nelayan/Pesisir)	16	16	100,00
1.10	Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya (NTN-P)	108,41	105,55	97,36

Keterangan : \*\* NTN Sumber BPS Provinsi Gorontalo Tahun 2016

**Penjelasan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sektor Perikanan dan Kelautan Tahun 2016**

1. Produksi perikanan tangkap adalah produksi perikanan yang dihasilkan oleh kegiatan penangkapan ikan baik diperairan laut maupun di perairan umum (Danau Limboto). Produksi perikanan tangkap dijadikan indikator kinerja utama (IKU) karena indikator ini merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi tingkat pendapatan nelayan dan nilai tukar Nelayan (NTN). Tahun 2016 capaian produksi perikanan tangkap sebesar 115,873 Ton, nilai ini melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 114,578 Ton, atau % capainya sebesar 101.13 %.

Keberhasilan capaian produksi perikanan tangkap ini dipengaruhi oleh beberapa faktor :

- Dinas Perikanan dan kelautan Provinsi Gorontalo Melaksanakan Program Perikanan Tangkap melalui Restrukturisasi Armada Tangkap Kapal Mina Maritim > 30 GT. Sebagai informasi dari tahun 2010 sampai tahun 2016 ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui anggaran APBN (TP) dan APBD (DAK) sudah mengalokasikan pembangunan dan penyediaan kapal > 30 GT sebanyak 48 unit atau dengan Rp. 65.363.078.750, khusus tahun 2016 sebanyak 3 Unit kapal Mina Maritim.
  - Membangun sarana rumah ikan (Fish Apartement) yang berfungsi menyediakan ekosistem buatan baru (Spawning and Nursery Ground) bagi siklus bertelur dan pembesaran ikan sehingga mampu bereproduksi dengan habitat yang baik sehingga mampu meningkatkan populasi ikan disuatu kawasan perairan.
  - Melakukan kegiatan “*one man one thousand fries*” melalui pengadaan benih ikan yang dilepas di perairan Teluk Tomini yang bertujuan untuk memperkaya stok populasi ikan tertentu sehingga mampu berkembang biak dan menunjang kapasitas keberadaan stok ikan di perairan.
  - Melakukan pembinaan kelompok kepada kelompok usaha perikanan tangkap dan kegiatan ini selalu berkoordinasi dengan dinas perikanan dan kelautan Kab/Kota dan Badan Koordinasi Penyuluh di tingkat provinsi maupun kab/kota.
2. Produksi perikanan budidaya adalah produksi perikanan yang dihasilkan oleh kegiatan budidaya ikan baik di perairan laut, payau maupun di perairan tawar (Danau Limboto). Produksi perikanan budidaya dijadikan indikator kinerja utama (IKU) karena indikator ini merupakan salah satu faktor utama yang juga mempengaruhi tingkat pendapatan pembudidaya dan nilai tukar pembudidaya (NTP). Tahun 2016 capaian produksi perikanan budidaya hanya sebesar 100.245 Ton atau hanya 53,574 % dari target yang ditetapkan (186,49 Ton). Capaian produksi perikanan budidaya ini terdiri dari produksi ikan budidaya (ikan dan udang) sebesar 38,295 ton dan produksi rumput laut sebesar 61,950 Ton. Tidak tercapainya produksi perikanan budidaya tahun 2016, untuk ikan dan produksi rumput laut dipengaruhi oleh beberapa faktor :
- Faktor cuaca yang tidak menentu yang mengakibatkan timbulnya penyakit ice-ice sehingga mengakibatkan kegagalan panen pada budidaya rumput laut.
  - Kurangnya ketersediaan bibit unggul rumput laut yang sangat dibutuhkan oleh pembudidaya rumput laut.
  - Kab. Boalemo yang merupakan salah satu penghasil rumput laut sejak tahun 2013 tidak mengalokasikan lagi anggaran untuk kegiatan budidaya rumput laut.
  - Faktor Cuaca dimana pada tahun 2016 terjadi kemarau panjang sehingga berkurangnya debit air pada lahan kolam budidaya air tawar, juga peningkatan suhu perairan di Danau Limboto sehingga terjadi fenomena up weling yang mengakibatkan kematian ikan-ikan yang berada di Karamba Jaring Apung (KJA).

- Tingginya nilai tukar dolar terhadap rupiah sangat mempengaruhi harga pakan ikan, dimana secara nasional bahan baku pembuatan pakan ikan masih menggunakan produk import. Hal ini mengakibatkan daya beli pakan ikan oleh pembudidaya mengalami penurunan sehingga produktifitas hasil perikanan budidaya cenderung berkurang dari target yang diharapkan.

Faktor-faktor di atas menjadi penyebab rendahnya atau tidak tercapainya target produksi perikanan budidaya di Tahun 2016.

3. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan/ pembudidaya (Ton) adalah produksi perikanan baik produksi perikanan tangkap maupun produksi perikanan budidaya yang dihasilkan oleh kelompok nelayan atau pembudidaya yang dibina langsung oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo dan Kab/kota baik yang mendapat alokasi anggaran tahun 2016 maupun pada tahun sebelumnya. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan/ pembudidaya pada tahun 2016 mengalami penurunan. Dengan capaian 99,50 % atau capaiannya 110,250 ton dari target yang ditetapkan sebesar 110,807 Ton. Produksi ini lebih didominasi oleh produksi ikan baik produksi ikan hasil tangkapan maupun ikan budidaya.
4. Konsumsi ikan (kg/kap/thn) adalah nilai konsumsi ikan masyarakat per kapita per tahun atau lebih dikenal dengan jumlah produk perikanan yang dikonsumsi oleh masyarakat dalam satu tahun. Konsumsi ikan di Provinsi Gorontalo tahun 2016 rata-rata sebesar 55,7 kg/kapita/tahun. Nilai ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 55 kg/kapita/tahun atau mencapai 101,27 %. Tingginya capaian konsumsi ikan tahun 2016 dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :
  - Terlaksananya program kampanye Gerakan Masyarakat Makan Ikan (GEMARIKAN) di setiap kabupaten kota melalui Kegiatan “*Fish To School*” bagi anak-anak usia sekolah dasar dan kegiatan bazar produk perikanan di wilayah-wilayah yang jauh dari sumber perikanan.
  - Dilakukannya fasilitasi pembentukan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) di kabupaten/kota. Sebagai bentuk penguatan program kampanye GEMARIKAN.
  - Pelaksanaan kegiatan lomba masak serba ikan yang dilakukan bersama organisasi Tim Penggerak PKK dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, Provinsi dan Tingkat nasional massif memberi dampak terhadap peningkatan pengetahuan keluarga dan masyarakat terhadap pentingnya konsumsi ikan bagi kesehatan, kekuatan dan kecerdasan.
  - Pelaksanaan Pasar Ikan Murah bagi masyarakat di seluruh wilayah kabupaten dan Kota sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat menjangkau harga ikan dan variatif jenis ikan yang ada sehingga kebutuhan protein hewani khususnya ikan dapat tersedia dalam pemenuhan gizi dan ketahanan pangan masyarakat Provinsi Gorontalo.
5. Cakupan bina kelompok Perikanan (kelompok) adalah kelompok perikanan baik kelompok perikanan tangkap, budidaya, dan pengolahan yang mendapat pembinaan langsung dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo dan Kab/kota seperti pembinaan peningkatan produksi perikanan dan manajemen pengelolaan

usaha perikanan serta kelompok yang mendapatkan bantuan sarana produksi perikanan dan Kelompok ini terdiri dari Kube Perikanan, kelompok pembudidaya, UKM Pengolahan dan pemasaran, kelompok wanita pesisir, kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS). Pada tahun 2016 relisasi cakupan bina kelompok sebesar 630 kelompok perikanan atau lebih 100 % dari target yang ditetapkan sebesar 630 kelompok. Peningkatan cakupan bina kelompok tahun 2016 sangat dipengaruhi oleh :

- Banyaknya aspirasi masyarakat perikanan (nelayan, pembudidaya dan pengolah) meminta Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi untuk bisa mendapatkan bantuan sarana produksi dan pembinaan langsung terhadap pengelolaan usaha perikanan. Aspirasi ini ditandai dengan banyaknya proposal masuk. Dimana usulan permohonan bantuan penguatan usaha perikanan diberikan prioritas bagi unit usaha perikanan yang sudah berkelompok.
  - Cakupan bina kelompok perikanan tidak hanya pada tahun pelaksanaan program atau tahun 2016. Cakupan bina kelompok juga dilakukan pada kelompok-kelompok pada tahun sebelumnya atau yang sudah mendapatkan sarana produksi pada tahun 2016 dan 2014, harapannya pola pembinaan kelompok terus dilakukan sehingga berdampak pada peningkatan produksi perikanan dan peningkatan pendapatan.
6. Pendapatan Nelayan (Rp/bln) adalah nilai bersih rata-rata dalam rupiah yang didapat oleh nelayan dari hasil kegiatan penangkapan ikan, baik kegiatan penangkapan ikan di laut maupun kegiatan penangkapan ikan di perairan umum. Pendapatan nelayan rata-rata per bulan pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 2.700.000 atau lebih 101,94 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 2.648.545/bulan. Naiknya pendapatan nelayan per bulan pada tahun 2016 dipengaruhi oleh beberapa faktor utama :
- Naiknya produksi perikanan tangkap di sebabkan oleh intervensi anggaran pemerintah melalui kegiatan restrukturisasi armada tangkap > 30 GT (kapal Mina Maritim dan mina maritim yang sampai tahun 2016 sudah berjumlah 45 unit kapal Mina Maritim dan mina maritim, dan bantuan sarana produksi berupa perahun fiber > 5 GT dan sarana alat tangkap kepada kelompok perikanan tangkap.
  - Nilai harga ikan yang cenderung stabil bahkan naik beberapa persen, khususnya pada komoditi perikanan tangkap yang mempunyai nilai ekonomi tinggi seperti Ikan Tuna, Tongkol dan cakalang. Produk perikanan ini umumnya sebagian kecil di dipasarkan di dalam daerah dan sebagian besar di pasarkan (diantar pulaukan) keluar Provinsi Gorontalo.
7. Pendapatan pembudidaya (Rp/bln) adalah nilai bersih rata-rata dalam rupiah yang didapat oleh pembudidaya dari hasil kegiatan budidaya, baik kegiatan budidaya perikanan laut (ikan dan rumput laut), Budidaya perikanan payau (udang dan bandeng) maupun budidaya perikanan air tawar (Ikan nila, mas, lele dll). Pendapatan pembudidaya rata-rata per bulan pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 2.500.000 atau lebih 109.74 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 2.278.085 /bulan. Naiknya pendapatan pembudidaya per bulan pada tahun 2016 seiring



dengan produksi budidaya rumput laut turun, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor :

- Pada daerah tertentu seperti di Kab. Boalemo dan Pohuwato yang merupakan salah satu daerah produksi rumput laut, banyak pembudidaya rumput laut yang beralih ke usaha lain seperti melakukan usaha budidaya laut dan payau (seperti budidaya ikan kerapu dan udang vaname).
  - Pengalihan usaha budidaya rumput laut ke usaha budidaya ikan, disebabkan oleh Faktor cuaca yang tidak menentu yang mengakibatkan timbulnya penyakit ice-ice pada rumput laut sehingga mengakibatkan kegagalan panen.
  - Produksi Komoditi perikanan budidaya (ikan kerapu dan udang vaname) mengalami kenaikan 150 – 200 % seiring dengan kenaikan harga ikan yang dipengaruhi oleh kenaikan dolar pada tahun 2016.
  - Harga ikan seperti udang vaname size 70 (70 ekor/kg) yang tadinya harga normal sebesar Rp. 40.000 /kg naik menjadi Rp.60.000 / kg. Ikan kerapu size 1 kg/hidup yang tadinya harga normalnya Rp. 200.000 /kg naik menjadi Rp. 350.000 /kg.
8. Pendapatan pengolah dan pemasar perikanan (Rp/Bln) nilai bersih rata-rata dalam rupiah yang didapat oleh pengolah dan pemasar hasil perikanan pada setiap bulan. Pendapatan pengolah dan pemasar rata-rata per bulan pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 3.400.000 atau lebih 99,96 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 3.401.204/bulan. Menurunnya pendapatan pengolah dan pemasar per bulan pada tahun 2016 dipengaruhi oleh beberapa faktor :
- Nilai harga ikan yang cenderung stabil bahkan naik beberapa persen, khususnya pada komoditi perikanan tangkap yang diolah yang mempunyai nilai ekonomi tinggi seperti Ikan Tuna, Tongkol dan cakalang. Harga ikan tuna utuh misalnya yang tadinya harga dipasar sekitar Rp. 40.000 per kg naik menjadi Rp. 60.000 – Rp. 100.000 per kg atau naik 50 – 150 %. Bahkan kalau di olah menjadi Tuna Loin harganya naik menjadi Rp. 90.000 – 120.000 per kg. ikan Cakalang dan tongkol yang juga merupakan ikan yang mempunyai nilai komoditi tinggi di tingkat pengolah dan pemasaran bahkan mencapai Rp. 20.000 – 25.000 per kg dari Rp. 10.000 – 15.000 per kg.
9. Desa Nelayan/Pesisir yang Menjadi Desa Tangguh /PDNT (Desa nelayan/Pesisir) adalah Jumlah desa nelayan yang diintervensi oleh Anggaran APBD Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui program/kegiatan Pengembangan Desa Nelayan Tangguh. Program/kegiatan PDNT adalah merupakan program yang berbasis desa, dimana Dinas Perikanan dan Kelautan mengintervensi beberapa kegiatan utama yang langsung dirasakan oleh nelayan dan wanita pesisir seperti bantuan sarana produksi (perahu fiber, mesin tempel dan katinting, sarana perbengkelan nelayan, freezer dan warung serba ada yang dikelola langsung oleh wanita pesisir. Tujuan program/kegiatan ini adalah meningkatkan produksi perikanan dan peningkatan kehidupan nelayan dari sisi ekonomi (peningkatan pendapatan). Pada tahun 2016 sasaran dan realisasi desa melalui kegiatan ini adalah 16 desa (100 %).
10. Nilai Tukar Nelayan dan pembudidaya (NTN-P) adalah nilai angka perbandingan antara indeks harga yang diterima nelayan/pembudidaya dengan indeks harga yang

dibayar nelayan/pembudidaya yang dinyatakan dalam persentase. Indeks yang diterima adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petani. Sedangkan indeks yang dibayar petani adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petani, baik kebutuhan untuk konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan untuk proses produksi perikanan. NTN (Nilai Tukar Nelayan) tahun 2016 ditargetkan sebesar 108,41. Nilai indeks ini belum dapat dicapai dan lebih rendah dari target yang ditetapkan (realisasi sebesar 105,55 angka berdasarkan rilis dari BPS pada bulan Januari 2017. Menurut keterangan dari BPS rendahnya capaian NTN-P ini sangat dipengaruhi oleh indeks biaya hidup nelayan dan pembudidaya, tingginya nilai indeks tersebut karena tingginya inflasi di daerah yang berdampak pada tingginya harga bahan pokok seperti beras, minyak kelapa dan gula pasir sehingga mengurangi indeks pendapatan dari nelayan/pembudidaya yang signifikan juga menurunkan NTN-P pada tahun 2016.



## 2.1.2 Kinerja Pembangunan Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Berdasarkan Program-Program Prioritas Daerah

### 1. Program Perikanan Tangkap

Program perikanan tangkap merupakan salah satu program sektor perikanan dan kelautan yang diharapkan untuk meningkatkan produksi perikanan dan peningkatan



kehidupan nelayan (PKN) di Provinsi Gorontalo. Untuk itu Pemerintah Provinsi melalui Kepemimpinan Bapak Gubernur mengupayakan beberapa terobosan yaitu dengan melakukan Restrukturisasi Armada Perikanan Tangkap, melalui Bantuan Sarana Produksi Perikanan Tangkap berupa pengadaan Perahu fiber < 5 GT dan Mesin tempel 15 PK untuk wilayah PDNT (di wilayah Perairan Laut Sulawesi dan Teluk Tomini), Pengadaan Perahu < 3 GT dan Mesin Katinting 9 PK untuk PDNT (di wilayah Perairan Laut Sulawesi dan

Teluk Tomini), Pengadaan Motor Tempel 15 PK serta pengadaan Perahu Fiber > 3 GT (Perahu Nike) . Langkah ini diambil oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagai jawaban untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam pengembangan perikanan tangkap di Provinsi Gorontalo yaitu masih tingginya (97,67 %) armada tangkap di Provinsi Gorontalo masih berstatus dibawah < 30 GT (perahu tanpa motor dan motor tempel) dan kesemuanya dimiliki oleh nelayan kecil (nelayan tradisional). Dengan kondisi tersebut, nelayan tentu saja tidak akan mampu menghasilkan produksi yang optimal. Apalagi para nelayan juga masih tergantung pada kondisi musim, dan cuaca, yang artinya bisa dipastikan jika mereka tanpa peralatan dan kapal yang memadai dan modern, maka sulit bagi nelayan untuk bisa meningkatkan hasil produksinya, dan produktivitas.

Upaya pengembangan, Restrukturisasi Armada perikanan tangkap melalui pembangunan dan penyediaan perahu fiber bagi nelayan di Provinsi Gorontalo. merupakan upaya dan solusi Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk membangun suatu perikanan tangkap yang memadai di Provinsi Gorontalo yang berbasis pada Blue Economy. Keseriusan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam pengembangan perikanan tangkap melalui semuanya untuk disalurkan kepada kelompok nelayan yang memenuhi kriteria dan persyaratan, khususnya untuk kegiatan operasionalnya.

Sebagai informasi dari tahun 2010 sampai tahun 2016 ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui anggaran APBN dan APBD sudah mengalokasikan pembangunan dan



penyediaan kapal Inkamina dan Mina Maritim > 30 GT sebanyak 48 unit, Rp. 59.250.431.000 Milyar Rupiah,

Ditambahkan Pula, bahwa Penyaluran dan Pemanfaatan Perahu fiber < 5 GT dan Mesin tempel 15 PK untuk wilayah PDNT (di wilayah Perairan Laut Sulawesi dan Teluk Tomini), Pengadaan Perahu < 3 GT dan Mesin Katinting 9 PK untuk PDNT (di wilayah Perairan Laut Sulawesi dan Teluk Tomini), Pengadaan Motor Tempel 15 PK serta pengadaan Perahu Fiber > 3 GT (Perahu Nike) di Provinsi Gorontalo sampai dengan tahun ini, **Alhamdulillah Sangat Berhasil** dan mendapatkan Apresiasi Positif dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, hal ini ditandai semua kapal yang sudah disalurkan, dilakukan dengan mekanisme yang sudah ditetapkan berhasil mengoperasikan perahu tersebut disertai dengan tingkat produksi perikanan tangkap yang cukup besar. Apresiasi dan penilaian yang baik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI ini, membuat Kementerian Kelautan dan Perikanan RI mengunjungi Provinsi Gorontalo dalam rangka untuk melihat langkah-langkah strategi yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam menerapkan Program Restrukturisasi Armada Perikanan Tangkap melalui pembangunan dan bantuan kapal perikanan kepada KUB (kelompok usaha bersama) Nelayan dengan model kemitraan. Provinsi Gorontalo dianggap mampu dan berhasil dalam menerapkan program ini, dibandingkan dengan Provinsi-Provinsi Lainnya yang menerapkan pola program yang sama.



Di Tahun 2016 juga, Dinas Perikanan dan Kelautan membangun Pos Pelayanan Terpadu yang ditempatkan di lokasi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tenda Kota Gorontalo dimana hal ini sangat memudahkan para nelayan dalam pengurusan penerbitan dan perpanjangan Perizinan Kapal. Selain itu Dinas Perikanan dan kelautan Provinsi Gorontalo juga memperkenalkan inovasi teknologi bagi nelayan melalui penerapan Zona Potensi Penangkapan Ikan (ZPPI) dimana ini merupakan kerjasama bersama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dimana melalui teknologi ini para nelayan akan memperoleh informasi titik koordinat lokasi berkumpulnya ikan di perairan wilayah Indonesia, sehingga para nelayan memiliki efisiensi waktu dan biaya operasional dalam menangkap ikan, dimana paradigma mencari ikan diganti dengan menangkap ikan melalui metode tersebut.



Hasil dari penerapan



restrukturisasi armada tangkap dilihat dari capaian produksi perikanan tangkap, dimana persentase capaian melebihi target yang ditetapkan yaitu dari target 114.578 Ton, menjadi 115.873 Ton atau capaian 101,13 %. Begitu pula dengan tingkat pendapatan nelayan yang sebelumnya di targetkan Rp. 2.648.545 per bulan menjadi Rp.2.700.000 per bulan atau naik 101,94 %.

## 2. Program Perikanan Budidaya

Perikanan budidaya diyakini memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang usaha guna mengurangi kemiskinan (*pro-poor*), menyerap tenaga kerja (*pro-job*) serta sekaligus mampu sebagai tumpuan pijakan bagi pertumbuhan ekonomi nasional (*pro-growth*).



Hal ini mengingat sumberdaya lahan perikanan budidaya masih besar dan belum sepenuhnya dimanfaatkan serta memiliki beberapa karakteristik keunggulan lain yang mampu dijadikan sebagai landasan penumbuhan ekonomi nasional. Disamping itu, perikanan budidaya mempunyai kemampuan mengurangi tekanan terhadap lingkungan dari kegiatan pemanfaatan sumberdaya perikanan dari perairan

umum melalui perekayasa ekosistem perairan untuk memproduksi ikan (*pro-sustainability*).

Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Perikanan dan Kelautan secara konsisten terus melaksanakan strategi dan kebijakan pembangunan yang telah direncanakan sesuai dengan visi dan misi pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategi (Renstra) Perikanan Budidaya baik dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya maupun Rencana Strategi



(Renstra) Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo.

Melalui dana APBD Provinsi Gorontalo TA. 2016 melaksanakan Program Pengembangan Budidaya Perikanan diimplementasikan kedalam tiga kegiatan yang mengacu pada pengembangan tiga kawasan perikanan budidaya yaitu (1). Pengembangan kawasan budidaya air tawar ; (2). Pengembangan Kawasan budidaya air payau dan : (3). Pengembangan kawasan budidaya air payau.



Dari beberapa program perikanan budidaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo, ada tiga program/kegiatan perikanan budidaya yang menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi Gorontalo yaitu (1). Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan Laut/Payau dan Operasional UPTD Balai Pengembangan Benih Ikan Laut dan Payau (BPBLP) melalui Penyediaan Benih ikan, bibit rumput laut dan pakan ikan) bagi Pembudidaya kecil, pembudidaya pemula dan Unit Pembenihan Rakyat (UPR); (2). Memberikan sertifikasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik bagi pembudidaya yang sudah mampu melaksanakan kegiatan budidaya sesuai dengan standart CBIB.

### 3. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Hasil Perikanan setiap tahunnya mengalami



peningkatan permintaan baik kualitas maupun kuantitasnya. Untuk memenuhi kualitas dan kuantitas produksi hasil perikanan maka peran Pemerintah sangat penting sebagai inisiator, fasilitator dan regulator terhadap pelaksanaan program ini. Dalam pelaksanaan program ini Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo, memfokuskan beberapa kegiatan yang menjadi indikator kinerja utama sektor perikanan dan

kelautan. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain :

(1). Peningkatan kelembagaan pelaku usaha perikanan, melalui pembinaan UMKM pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta melakukan bimbingan teknis produk olahan ikan bernilai tambah ; (2). Pengembangan dan Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan serta pemasaran hasil perikanan, Optimalisasi industri pengolahan pasca panen rumput laut melalui penguatan



kelembagaan pelaku usaha rumput laut. Sedangkan untuk peningkatan jaminan mutu hasil perikanan yang akan di pasarkan, Pemerintah Provinsi Gorontalo memberikan bantuan cuma-cuma motor roda dua bercool box bagi pedagang ikan yang masih menggunakan sepeda. (3). Kampanye peningkatan konsumsi ikan oleh kelembagaan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional (FORIKAN) daerah

Provinsi Gorontalo bagi masyarakat, khusus bagi pelajar dan anak-anak Sekolah, Bazar dan Pasar Ikan Murah bagi Masyarakat



#### 4. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan

Pada pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan, Pemerintah Provinsi Gorontalo juga memfokuskan beberapa kegiatan yang tidak lain sebagai langkah strategi Pemerintah Provinsi untuk menjaga sumberdaya perikanan agar lestari dan mengurangi ilegal fishing. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah peningkatan kapasitas kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) di masing-masing kecamatan pesisir dan melaksanakan koordinasi dan harmonisasi kegiatan pengawasan antara Instansi Terkait yaitu Pemerintah Provinsi Gorontalo, TNI Angkatan Laut dan Kepolisian Perairan RI.



Untuk kegiatan koordinasi dan harmonisasi pengawasan sumberdaya perikanan di Provinsi Gorontalo, Pemerintah Provinsi Gorontalo (Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Gorontalo) menginisiasi Kerjasama Pengawasan Terpadu antara Pemerintah Provinsi Gorontalo, TNI AL dan Polisi Perairan Polda Gorontalo melalui sebuah nota kesepahaman (MOU) tentang kegiatan pengawasan sumberdaya perikanan di Perairan Gorontalo. MOU ini ditandatangani oleh ketiga Pimpinan (Gubernur Gorontalo, Dan Lanal AL Gorontalo dan Kapolda Gorontalo) pada tanggal 15 Oktober 2012 di Kapal Operasi Pengawasan Polair Kutilang. Penanda tanganan MOU pengawasan terpadu untuk memenuhi kebutuhan Standar Operasional Prosedur Pengawasan Dan Penegakan Hukum Dibidang Perikanan Dan Kelautan di Provinsi Gorontalo.

Penandatanganan MOU ini di dasari juga sebagai tindak lanjut atas : (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 yang dirubah menjadi Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Penyidik Tindak Pidana Perikanan adalah PPNS Perikanan, Penyidik Polri dan Penyidik TNI-AL ; (2). Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil adalah Penyidik PPNS tertentu dan Penyidik Polri. ; (3). Kesepakatan Bersama antara Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KB.05A/DJP2SDKP/2008, Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/325/II/2008 dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Nomor : B/150/II/2008 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penanganan Tindak Pidana Perikanan pada Tingkat Penyidikan.

Kegiatan kerjasama pengawasan ini juga berlanjut sampai tahun 2016, khususnya dalam pengawasan sumberdaya perikanan dan melakukan pembekalan bagi kelompok pengawas masyarakat (Pokmaswas).

## 5. Program Kelautan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Program Kelautan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir adalah merupakan salah satu program utama disektor Perikanan dan Kelautan. Program ini



memuat beberapa kegiatan yang fokus pada konservasi sumberdaya mangrove dan peningkatan kesejahteraan nelayan melalui pemberian sarana produksi perikanan bagi nelayan dengan Program Pengembangan Desa Nelayan Tangguh.

Khusus Program Pengembangan Desa Nelayan Tangguh (PDNT) yang menjadi bagian dari Program kelautan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir adalah sebuah **Program INOVASI Pemerintah Provinsi Gorontalo** untuk

menjawab menjawab berbagai Permasalahan di Desa Nelayan. Permasalahan-permasalahan itu antara lain :

1. Pembangunan desa yang dilaksanakan selama ini bersifat sektoral, dan hanya akan memberikan solusi secara parsial juga, sehingga tidak ada jaminan kelangsungan program tersebut ;
2. SDM yang rendah dan infastruktur dasar yang kurang memadai di desa, memberikan kontribusi besar terhadap melambatnya berbagai upaya pelaksanaan pembangunan desa itu sendiri ;
3. Keterbatasan sumber pendanaan, baik dari desa , Kecamatan maupun dari Kabupaten, merupakan faktor utama lain yang menyebabkan proses pembangunan desa juga agak terhambat ;
4. Kurangnya sarana & prasarana produksi perikanan dan penunjang lainnya (alat tangkap dan armada tangkap, cool box, sarana pengolahan) yang dimiliki oleh nelayan, masih tingginya kebutuhan es, kurangnya pasokan listrik dan masalah BBM pada sentra-sentra produksi, dll ;
5. Sumberdaya ikan (SDI) pada daerah pesisir, sudah mulai menurun akibat ilegal fishing ;
6. Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang memadai ;
7. Kurangnya infrastruktur dasar lainnya seperti akses jalan, sarana air bersih , sanitasi dan rumah layak huni ;
8. Rendahnya akses pasar produk hasil perikanan ;
9. Kurangnya akses permodalan bagi nelayan dalam peningkatan usahanya



Dari berbagai Permasalahan yang dihadapi di Desa Nelayan maka Pemerintah Provinsi Gorontalo mengambil langkah strategi yaitu :

1. Diperlukan suatu konsep yang matang dengan sasaran bahwa pembangunan pedesaan sangat penting dilakukan dengan tujuan untuk *meningkatkan kehidupan sosial dan kehidupan ekonomi masyarakat desa, sehingga mereka memperoleh tingkat kepuasan dalam pemenuhan kebutuhan material dan spiritual* ;



2. Pembangunan desa secara konkret harus memperhatikan berbagai faktor, diantaranya adalah terkait dengan *pembangunan ekonomi, pembangunan/pelayanan pendidikan dan kesehatan, pengembangan kapasitas pemerintahan dan penyediaan berbagai infrastruktur desa* ;
3. Selama ini permasalahan tersebut selalu terjadi karena desa sendiri tidak memiliki konsep dalam merancang pembangunan desa dan. untuk mengatasi persoalan tersebut, upaya yang perlu dilakukan tidak lagi semata mata mengandalkan pada kebijakan ekonomi makro, tetapi juga diimbangi dengan kebijakan mikro yang terintegrasi, berupa terobosan yang inspiratif, kreatif dan inovatif yang secara langsung dengan memberikan dampak atau impac pada peningkatan pembangunan desa itu sendiri;

4. Dengan melihat desa sebagai wadah kegiatan ekonomi paling bawah, kita harus merubah pandangan inferior atas wilayah ini, dan merubahnya dengan memandang desa sebagai basis potensial kegiatan ekonomi melalui investasi prasarana dan sarana yang menunjang berbagai keperluan, khususnya keperluan nelayan, serta mengarahkannya secara lebih terpadu ;



5. Sudah saatnya desa tidak dapat lagi dipandang hanya sebagai wilayah pendukung kehidupan daerah perkotaan, namun seharusnya pembangunan wilayah kota haruslah terintegrasi dengan pembangunan desa.

6. Peran Pemerintah, sangat diharapkan dalam mengintervensi berbagai kebutuhan dasar pembangunan desa, sehingga desa akan menjadi dasar penggerak perekonomian Negara.

Program PDNT (Program Pengembangan Desa Nelayan Tangguh), di dasari juga dengan beberapa Undang-Undang dan Peraturan yang mengatur tentang Desa yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 31 tentang Perikanan ; Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Presiden Nomor : 5 tahun 2010 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010-2016
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Tata Cara Pembangunan Desa.

Program PDNT (Program Pengembangan Desa Nelayan Tangguh), dilaksanakan dengan tujuan bagaimana Desa Nelayan menjadi desa yang kuat ekonominya dengan menjadikan nelayan menjadi sejahtera dan terpenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan bagi anak-



anak nelayan, kesehatan bagi keluarganya, aksesbiliti jalan perkambungan nelayan yang baik, tersedianya perumahan layak huni bagi nelayan dan kebutuhan akan air bersih dan listrik bagi nelayan. Kesemua kebutuhan ini tidak akan terpenuhi, jika pembangunan sebuah daerah hanya berfokus pada pembangunan sektoral dan tidak berbasis pada wilayah. Untuk menjawab semua itu, Pemerintah Provinsi Gorontalo, menjadikan Program PDNT sebagai Program Utama Pembangunan Berbasis Wilayah, Khususnya di Daerah Pesisir atau Desa Nelayan. Karena program ini tidak saja melaksanakan program perikanan dan kelautan, tapi juga melibatkan beberapa sektor yang fokus dan mempunyai sumberdaya dalam pembangunan berbasis desa. Karena strategisnya program PDNT ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo memasukkannya dalam RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017 dan harapannya 77 desa nelayan bisa dilaksanakan dengan program PDNT tersebut sampai tahun 2017.

Program PDNT merupakan program yang sangat penting dan harus serius dalam pelaksanaannya, sehingganya pada tahun 2012 dan tahun 2016 program ini sudah menyentuh 58 Desa nelayan dari 77 desa yang ditargetkan.

Pada pelaksanaan program PDNT ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo selain memberikan dan mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan sarana produksi perikanan berupa (mesin tempel, mesin katinting,



perahu, alat tangkap, cool box dan peralatan perikanan lainnya) juga mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan Waserda (warung serba ada) bagi kelompok perempuan pesisir yang merupakan istri-istri para nelayan. Tujuan pemberian waserda tersebut, diharapkan disaat kondisi paceklik (kondisi laut tidak memungkinkan untuk menangkap ikan), para istri atau perempuan pesisir bisa membantu keluarganya dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini juga mengakomodir bahwa program perikanan dan kelautan juga diharapkan berbasis pada pemenuhan kebutuhan gender. .

Selain Program PDNT (Program Pengembangan Desa Nelayan Tangguh), Pemerintah Provinsi Gorontalo pada program

kelautan dan pesisir juga mengalokasikan anggaran pada kegiatan program usaha garam rakyat (PUGAR) yang berlokasi di kec, Wonggarasi Kab. Pohuwato..

### **BAB. III**

#### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi dan Nasional**

##### **3.1.1. Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 dan Pada Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019,**

Sejalan dengan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, pembangunan perikanan dan kelautan fokus pada Nawa Cita ke 7 (ketujuh) yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis domestic, salah satunya sektor ekonomi maritime dan kelautan dan perikanan ada didalamnya. Terkait dengan cita-cita pembangunan tersebut, maka Pemerintah nasional mengeluarkan 4 kebijakan terkait dengan pengembangan ekonomi maritime dan kelautan :

- 1) Percepatan pengembangan ekonomi kelautan
- 2) Meningkatkan dan mempertahankan kualitas daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut;
- 3) Meningkatkan wawasa dan budaya bahari serta pengautan peran SDM dan Iptek Kelautan
- 4) Meningkatkan harkat dan tara hidup nelayan dan masyarakat pesisir

##### **3.1.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah.**

Dari visi, misi dan program Gubernur Gorontalo periode 2012-2017, tujuan pembangunan perikanan dan kelautan adalah sebagai berikut :

- 1). Pembangunan sektor perikanan dan kelautan dilaksanakan dengan lebih inovatif, kreatif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
- 2). Penerapan pengelolaan yang baik terhadap potensi sumberdaya perikanan dan kelautan yang diarahkan untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, dengan memegang prinsip keterpaduan (terintegrasi) dan berkelanjutan;
- 3). Peningkatan kualitas pelayanan umum bidang perikanan dan kelautan.

##### **3.1.3. Telaahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2018.**

Sejalan dengan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, pembangunan perikanan dan kelautan fokus pada Nawa Cita ke 7 (ketujuh) yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis domestic, salah satunya sektor ekonomi maritime dan kelautan dan perikanan ada didalamnya. Terkait dengan cita-cita pembangunan tersebut , maka Pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan strategis pembangunan perikanan dan



kelautan melalui peningkatan pembangunan kelautan dan sumberdaya alam lainnya sesuai dengan potensi daerah yang dikelola secara terpadu dan berkelanjutan.

Berdasarkan kerangka pencapaian tujuan RPJMN 2010-2017, RPJPD 2007-2015, Rancangan RPJMD Provinsi Gorontalo 2018-2022, Renstra Perikanan dan Kelautan 2018-2022, RKPD Provinsi Gorontalo 2018 maka Kebijakan Renja Perikanan dan Kelautan Tahun 2018 Provinsi Gorontalo masuk pada :

- 1). **Masuk Pada Misi Pertama RPJPD** : diarahkan pada Prioritas RKPD 2018 yaitu :
  - Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam, Peningkatan kualitas lingkungan hidup, konservasi hutan dan pengelolaan bencana melalui Pembangunan Pertanian dan Perikanan Kelautan untuk ketahanan pangan,
  - Pengembangan wilayah strategis dan pedesaan melalui Pembangunan Kelautan serta Pembangunan Pedesaan.
- 2). **Masuk Pada Misi Kedua RPJPD** : diarahkan pada Prioritas RKPD 2018 yaitu :
  - Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan melalui program penanggulangan kemiskinan.
- 3). **Masuk Pada Misi Ketiga RPJPD** : diarahkan pada Prioritas RKPD 2018 yaitu :
  - Pengembangan tata keola pemerintahan yang baik, sebagai landasan pembangunan disegala bidang melalui Program penanggulangan kemiskinan.

## 1.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan Renja pembangunan perikanan dan kelautan Provinsi Gorontalo tahun 2018 mengacu pada prioritas RKPD Provinsi Gorontalo tahun 2018 yaitu :

- 1) Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan yang berdaya saing, meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan dan pedagang ikan, serta memperluas akses pasar ;
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana perikanan dan kelautan yang berdaya saing, mengoptimalkan Balai Benih Ikan Sentral (BBIS), Balai Benih Ikan Pantai (BBIP), Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP), Unit Pengolahan Ikan (UPI), dan Taksi Mina Bahari (TMB).
- 3) Meningkatkan pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan melalui program pemulihan/pengkayaan sumberdaya ikan, rehabilitasi dan konservasi laut pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 4) Meningkatkan kualitas SDM perikanan dan kelautan yang berbasis penerapan IPTEK dan daya saing.
- 5) Meningkatkan kualitas pelayanan perkantoran / pelayanan publik bidang perikanan dan kelautan.

Fokus utama rencana pelaksanaan program/kegiatan perikanan dan kelautan TA. 2018, tetap akan mengacu pada RPKD Provinsi Gorontalo Tahun 2018 yaitu :

- 1) Peningkatan produksi perikanan, peningkatan pendapatan masyarakat perikanan (nelayan, pembudidaya dan pengolah/pemasar hasil perikanan), peningkatan nilai tambah hasil perikanan serta sinergi hulu-hilir usaha ekonomi kelautan dan perikanan berbasis komoditas dan kawasan ; pembenahan sistem dan manajemen pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan ;
- 2) Pengembangan dan penguatan sentra produksi perikanan tangkap, sentra produksi perikanan budidaya, sentra pengolahan dan pemasaran hasil perikanan melalui penyediaan sarana dan prasarana perikanan untuk mendukung sistem logistic ikan nasional.
- 3) Peningkatan daya saing usaha dan produk perikanan serta memperkuat akses system pemasaran hasil perikanan dan promosi gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemar Ikan).
- 4) Penguatan Balai Benih Ikan (BBIAT & BPBILP) dan Laboratorium pengendalian mutu melalui peningkatan sarana prasarana dan peningkatan kapasitas SDM Kelautan Perikanan untuk menunjang ketersediaan benih unggul dan pengujian mutu hasil perikanan..
- 5) Peningkatan kehidupan nelayan melalui kegiatan PDNT dan peningkatan kualitas lingkungan di pulau-pulau kecil berbasis masyarakat melalui rehabilitasi ekosistem pesisir dan bantuan sarana prasarana di pulau-pulau kecil.
- 6) Pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengembangan sistem pengawasan terpadu dan pemberdayaan Pokmaswas,
- 7) Penguatan system perencanaan dan movev di sektor perikanan dan kelautan ; Peningkatan SDM kelautan dan perikanan melalui pelatihan dan bimtek ; Peningkatan pelayanan ke masyarakat, dengan menerapkan SPM dan SOP pelayanan di bidang perikanan dan kelautan.

Sedangkan sasaran pembangunan perikanan dan kelautan Provinsi Gorontalo Tahun 2018 juga mengacu pada sasaran Rancangan Renstra 2018-2022 yang ditetapkan pada tabel sebagai berikut :

**Sasaran/Target Capaian yang Menjadi Indikator Kinerja Utama  
Sektor Perikanan dan Kelautan Tahun 2018.**

No.	Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Proyeksi Target/Sasaran Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2018	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>1.</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>							
1.1	Produksi perikanan Tangkap (ton)	127.296	127.296	133.661	140.344	147.361	154.729	154.729
1.2	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	95.609	95.609	100.336	105.306	110.533	116.029	116.029
	- Produksi Ikan Budidaya (Ton)	45.131	45.131	47.839	50.709	53.752	56.977	56.977
	- Produksi rumput laut (Ton)	50.478	50.478	52.497	54.597	56.781	59.052	59.052
	Total Produksi (Tangkap + Budidaya) (Ton)	222.905	222.905	233.997	245.650	257.894	270.758	270.758
1.3	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan/ pembudidaya (Ton)	66.872	66.872	70.199	73.695	77.368	81.227	81.227
1.4	Konsumsi ikan (kg/kap/thn)	57,38	57,38	57,95	58,53	59,12	59,71	59,71
1.5	Cakupan bina kelompok Perikanan (kelompok)	674	674	688	701	715	730	730
1.6	Pendapatan Nelayan (Rp/bln)	2.800.000	2.800.000	2.912.000	3.028.480	3.149.619	3.275.604	3.275.604
1.7	Pendapatan pembudidaya (Rp/bln)	2.700.000	2.700.000	2.916.000	3.149.280	3.401.222	3.673.320	3.673.320
1.8	Pendapatan pengolah dan pemasar perikanan (Rp./Bln)	3.672.000	3.672.000	3.965.760	4.283.021	4.625.662	4.995.715	4.995.715
1.9	Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya (NTN-P)	105,70	105,70	105,86	106,02	106,18	106,34	106,34
2.0	Desa Nelayan/Pesisir yang Menjadi Desa Tangguh /PDNT (Desa Nelayan/Pesisir)	5	5	5	5	5	5	5

### 1.3. Rencana Kerja Program dan Kegiatan Tahun 2018.

Rencana kerja program dan kegiatan tahun 2018 untuk alokasi anggaran APBD, memuat berbagai program dan kegiatan yang tidak lepas dari pencapaian tujuan dan sasaran IKU pada Rancangan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan dan Rancangan RPJMD Provinsi Gorontalo 2018 – 2022. Total alokasi anggaran untuk Usulan Program/Kegiatan Perikanan dan Kelautan Tahun 2018 setelah pembahasan Sinkronisasi Program dan Forum SKPD dengan Kab/kota, serta Penyesuaian dengan Dokumen RPKD Provinsi Gorontalo tahun 2018, maka rencana alokasi anggaran untuk sektor perikanan dan kelautan Tahun 2018 sebesar **Rp. 47.860.800.000.**

Program/Kegiatan perikanan kelautan yang dilaksanakan pada tahun 2018 merupakan program/kegiatan yang sudah disinkronkan antara pihak Provinsi dan Kabupaten/Kota pada kegiatan *Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program/Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tingkat Provinsi Gorontalo*. Dan yang menjadi catatan penting dari hasil pembahasan tersebut adalah :

- 1). Program/kegiatan yang diusulkan tahun 2018 diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran dan target yang ditetapkan (IKU Nasional, Provinsi dan Kab/kota).
- 2). Program/kegiatan tersebut merupakan program/kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat perikanan (Nelayan, Pembudidaya dan Pengolah/pemasar) untuk meningkatkan produksi dan pendapatan pembudidaya.
- 3). Program/kegiatan tersebut sudah melalui mekanisme penyusunan program dan kegiatan yang berlaku.

Mengetahui,  
Kepala Dinas  
Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo

Sutrisno, A.Pi, M.Si  
NIP. 196304251986031018



**TABEL. T-VI.C.10**

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD**  
**TAHUN 2018**  
**DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019 PROVINSI GORONTALO**  
**BERDASARKAN MATRIKS PERMENDAGRI No. 54**



**PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO**  
**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO**  
**TAHUN 2017**

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019 PROVINSI GORONTALO**

**NAMA SKPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO**

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OutComes)/KEGIATAN(Output)	RENCANA TAHUN 2018 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(9)	(10)
2 05	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan								
2 05 01 01	Dinas Kelautan dan Perikanan								
2 05 2 05 01 21	Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Tangkap	Peningkatan produksi/ produktivitas perikanan tangkap dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah Teluk Tomini & Laut Sulawesi & pengembangan Kawasan Pesisir Perikanan dan Kelautan Terpadu (KP2KT) untuk peningkatan kehidupan nelayan dan sumber ketahanan pangan	Provinsi Gorontalo	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap 127.296 ton ; Pendapatan Rp. 2.800.000 /bln dan NTN 105,70	20.494.500.000	APBD		Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap 133.661 ton ; pendapatan Rp. 2.912.000 /bln dan NTN 105,86	22.543.950.000
2 05 2 05 01 21 08	Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (Penanggulangan Kemiskinan melalui TIP EK (Tingkatkan Pendapatan - Entaskan Kemiskinan) Lokus pada Kecamatan Sasaran di Kabupaten dan Kota Program Intervensi masyarakat miskin dalam Basis Data Terpadu (BDT).	Pengembangan Kawasan Pesisir Perikanan dan Kelautan Terpadu (KP2KT) sektor perikanan tangkap melalui penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap berupa kapal < 5 GT , > 3 GT dan Alat Penangkap Ikan , Pembangunan prasarana PPI , dan Alat bantu penangkapan ikan (SMART Fisheries) serta pembinaan bagi kelompok nelayan	Provinsi Gorontalo (Kec. Dumbo Raya, Kec. Bilato, Kec. Paguyaman Pantai, Kec. Lemito, Kec. Kabila Bone, dan Kec. Ponele Kepulauan)	200 RTM Perikanan Tangkap di Kawasan Pesisir Perikanan dan Kelautan	19.804.500.000			490 Kelompok Usaha Perikanan Tangkap di Kawasan Pesisir Perikanan dan Kelautan Terpadu (KP2KT)	21.784.950.000
	- Pembangunan kapal < 5 GT (Fiber) bermesin tempel 25 PK	Penyediaan kapal < 5 GT (Fiber) bermesin tempel 25 PK sebanyak 50 Unit	Provinsi Gorontalo, Kab/Kota	50 Unit	5.000.000.000	APBD	Variabel yg menggefisienkan biaya (Interfensi Pengentasan Kemiskinan)		
	- Perahu Fiber dan Mesin 15 PK	Tersedianya 50 Unit Perahu Fiber dan Mesin 15 PK untuk Nelayan	Provinsi Gorontalo, Kab/Kota	100 Unit	7.000.000.000	APBD	Variabel yg menggefisienkan biaya (Interfensi Pengentasan Kemiskinan)		
	- Pengadaan Peralatan Smart Fisheries / Nelayan Pintar	1 Paket Peralatan Smart Fisheries / Nelayan Pintar bagi pelaku usaha perikanan Tangkap	Provinsi Gorontalo, Kab/Kota	1 Paket	300.000.000	APBD	Variabel yg meningkatkan penerimaan nelayan (Interfensi Pengentasan Kemiskinan)		
	- Pendampingan/Pembinaan Kelompok Usaha Perikanan Tangkap	Pendampingan/Pembinaan Kelompok Usaha Perikanan ke seluruh wilayah Kabupaten dan Kota (6 Wilayah) se Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo, Kab/Kota	1 Paket	300.000.000	APBD			
	- Pengadaan Katintin 5 PK*	Tersedianya 45 Unit Katintin 5 PK untuk Nelayan	Provinsi Gorontalo, Kab/Kota	45 Unit	270.000.000	APBD	*Aspirasi DPRD		
	- Pengadaan Katintin 9 PK*	Tersedianya 126 Unit Katintin 9 PK untuk Nelayan	Provinsi Gorontalo, Kab/Kota	126 Unit	945.000.000	APBD	*Aspirasi DPRD		
	- Mesin Tempel 15 PK*	Tersedianya 57 Unit Masin Tempel 15 PK untuk Nelayan	Provinsi Gorontalo, Kab/Kota	57 Unit	1.909.500.000	APBD	*Aspirasi DPRD		
	- Perahu Fiber dan Mesin Katinting < 3 GT*	Tersedianya 37 Unit Perahu Fiber dan Mesin Katinting < 3 GT untuk Nelayan	Provinsi Gorontalo, Kab/Kota	37 Unit	1.665.000.000	APBD	*Aspirasi DPRD		
	- Rumpun dan Sarana Penunjang*	Tersedianya 26 Unit Rumpun dan Sarana Penunjang untuk Nelayan	Provinsi Gorontalo, Kab/Kota	26 Unit	2.080.000.000	APBD	*Aspirasi DPRD		
	- Pemberdayaan Kelompok Nelayan Bagan*	1 Paket Pemberdayaan Kelompok Nelayan Bagan	Kec. Mananggu, Kab. Boalemo	1 Paket	200.000.000	APBD	*Aspirasi DPRD		
	- Pemberdayaan Kelompok Nelayan*	3 Paket Pemberdayaan Kelompok Nelayan	Kab. Pohuwato	3 Paket	135.000.000	APBD	*Aspirasi DPRD		
2 05 2 05 01 29 01	Peningkatan Ketrampilan dan Pengetahuan Pelaku Usaha Perikanan Tangkap	Peningkatan SDM Perikanan Tangkap dengan pelatihan keahlian BST, SKK 60 Mil, ANKAPIN; Terlaksananya kegiatan temu lapang dan pembinaan KUB di Kab/Kota serta Terlaksananya Jaminan asuransi bagi nelayan	Provinsi Gorontalo	1440 Orang pelaku usaha perikanan tangkap	690.000.000	APBD		1728 Orang pelaku usaha perikanan tangkap	759.000.000
	- Pelatihan SKK 60 Mil	Peningkatan SDM bagi 30 Orang Nelayan dalam Sertifikasi Pelatihan SKK 60 Mil	Provinsi Gorontalo	30 org	100.000.000	APBD	Variabel yg meningkatkan penerimaan nelayan		
	- Temu Lapang Perikanan Tangkap	Temu Lapang Perikanan Tangkap yang dilaksanakan di 5 Lokasi Kabupaten Kota Se Provinsi Gorontalo	Kab/kota	5 Lokasi	150.000.000	APBD	Variabel yg meningkatkan penerimaan nelayan		
	- Asuransi Nelayan	Jaminan Asuransi Bagi 1000 Nelayan yang berada di seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo	Kab/kota	1.000 Nelayan	240.000.000	APBD	Variabel yg menggefisienkan biaya		
	- Gerai Mina Bahari Rakyat (GEMBIRA)	Gerai Mina Bahari Rakyat (GEMBIRA) di 8 Kawasan PPI/TPI	8 Kawasan (PPI Tenda, PPI Inengo, PPN Kwandang, PPI Gentuma, TPI Bilato, PPI Tilamuta, TPI Paguat, PPI Tongo)	8 Kawasan PPI	200.000.000	APBD			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OutComes)/KEGIATAN(Output)	RENCANA TAHUN 2018 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(9)	(10)
2 05 2 05 01 20	Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya	Peningkatan produksi, produktivitas pembudidayaan ikan dan Pengembangan Kawasan Kelautan dan Perikanan Terpadu Perikanan Budidaya di Kawasan-kawasan perikanan budidaya untuk penguatan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan pembudidaya ikan serta terjaminnya mutu hasil produk perikanan budidaya melalui penerbitan sertifikat	Provinsi Gorontalo	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya 95.609 Ton (Produksi Ikan 45.131 Ton; Produksi Rumput Laut 50.478 Ton) dan Pedapatan Budidaya Rp. 2.700.000/bln	4.374.500.000	APBD		Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya 100.336 Ton (Produksi Ikan 47.839 Ton; Produksi Rumput Laut 52.497Ton) dan Pedapatan Pembudidaya Rp. 2.916.000 /bln	4.811.950.000
2 05 2 05 01 20	06 Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Air Payau	Pengembangan sentra produksi perikanan budidaya air payau melalui penyediaan sarana produksi pembudidayaan ikan dan intensifikasi budidaya air payau (khususnya untuk komoditi udang Vaname), Pendampingan Usaha Budidaya melalui Kegiatan Aquaculture Mobile Clinic (AMC) serta Pengembangan percontohan budidaya kepiting bakau dengan sisitim Silvofisheries.	Lokasi 3 (tiga) kawasan pengembangan yaitu Kab. Pohuwato, Gorontalo Utara, Boalemo	untuk 20 kelompok KUB perikanan budidaya air payau dan Produksi Perikanan Budidaya Air Payau yang dihasilkan 240 ton (Udang Vaname)	2.304.500.000	APBD		untuk 40 kelompok KUB perikanan budidaya Produksi Perikanan Budidaya Air Payau (Udang 288 ton)	2.534.950.000
	- Gerakan Pengembangan kampung vanamme (Gerbang KAVE) Di Tiga Kabupaten	1.5ton / ha *10 ha *4 kali * 3 lokasi							
	- Bantuan sarana produksi Perikanan Payau (Pompa untuk tambak)	Sarana produksi Perikanan Payau (Pompa untuk tambak) sebanyak 2 Paket di Kawasan Kab. Pohuwato, Kab. Gorut dan Kab. Boalemo	Kec. Paguat, Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato, Kec. Anggrek, Kec. Kwandang, Kec. Tomilito Kab. Gorut, Kec. Mananggu Kab. Boalemo	3 Paket	500.000.000	APBD			
	- Bantuan sarana produksi perikanan payau (benur udang)	Sarana produksi perikanan payau (benur udang) Sebanyak 10 Juta Ekor di Kawasan Kab. Pohuwato, Kab. Gorut dan Kab Boalemo	Kec. Paguat, Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato, Kec. Anggrek, Kec. Kwandang, Kec. Tomilito Kab. Gorut, Kec. Mananggu Kab. Boalemo	10 juta ekor	594.000.000	APBD			
	- Bantuan sarana produksi perikanan payau (Pakan udang)	Sarana produksi perikanan payau (Pakan udang) Sebanyak 30 Ton di Kawasan Kab. Pohuwato, Kab. Gorut dan Kab Boalemo	Kec. Paguat, Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato, Kec. Anggrek, Kec. Kwandang, Kec. Tomilito Kab. Gorut, Kec. Mananggu Kab. Boalemo	30 Ton	540.000.000	APBD			
	- Bantuan sarana produksi perikanan payau (Pupuk)	Sarana produksi perikanan payau (Pupuk) Sebanyak 23 Ton di Kawasan Kab. Pohuwato, Kab. Gorut dan Kab Boalemo	Kec. Paguat, Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato, Kec. Anggrek, Kec. Kwandang, Kec. Tomilito Kab. Gorut, Kec. Mananggu Kab. Boalemo	23 Ton	195.500.000	APBD			
	- Temu Lapang Perikanan Budidaya Air Payau	Kegiatan Temu Lapang Perikanan Budidaya Air Payau yang dilaksanakan di 3 (tiga) Kawasan : Kab. Pohuwato, Kab. Gorut dan Kab. Boalemo	Kab. Pohuwato, Gorut, Boalemo	3 Lokasi	75.000.000	APBD			
	- Pendampingan/Pembinaan Kelompok Usaha Budidaya Air Payau	1 (Satu) Paket Kegiatan pendampingan kelompok usaha Budidaya Air Payau di Kawasan Kab. Pohuwato, Kab. Gorut dan Kab Boalemo	Kab./Kota	1 paket	100.000.000	APBD			
	- Bimbingan Teknis Budidaya Air Payau	Bimbingan Teknis Budidaya Air Payau bagi 60 (enam puluh) Orang pembudidaya di Kawasan Kab. Pohuwato, Kab. Gorut dan Kab Boalemo	Kab. Pohuwato, Gorut, Boalemo	60 Orang	100.000.000	APBD			
	- Pengembangan Percontohan budidaya kepiting bakau dengan sistem silvofisheries (Crab Ball)	1 (satu) Paket Percontohan budidaya kepiting bakau dengan sistem silvofisheries (Crab Ball)	Kab. Pohuwato	1 Paket	200.000.000	APBD			
2 05 2 05 01 20	09 Pengembangan Kawasan Budidaya Laut	Pengembangan sentra produksi perikanan budidaya air laut melalui penyediaan sarana produksi perikanan budidaya laut ; pembinaan dan penguatan kapasitas pembudidaya yang menerima bantuan sarana rumput laut dan budidaya ikan laut	Kab Pohuwato, Kab Boalemo dan Kab. Gorontalo Utara	Kelompok Budidaya air laut 65 kelompok, Benih ikan laut 13.000 Ekor, benih rumput laut sebesar 105 Ton	2.070.000.000	APBD		Kelompok Budidaya air laut 65 kelompok, Benih ikan laut 15.600 Ekor, benih rumput laut sebesar 126 Ton	2.277.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OutComes)/KEGIATAN(Output)	RENCANA TAHUN 2018 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(9)	(10)
	- Program Pengembangan Kebun bibit rumput laut :	Program Sarana produksi kebun rumput laut di 4 (Empat) Kecamatan dengan 40 Orang Pembudidaya	Kec. Anggrek, Kec. Ponelo Kepulauan Kab Gorontalo Utara, Kec. Popayato Timur, Kec. Popayato Kab. Pohuwato	4 Paket (Bibit rumput laut 5,6 Ton)	1.100.000.000	APBD			
	- Bimbingan Teknis Kebun Bibit Rumput Laut	Terlaksananya Bimbingan Teknis Kebun Bibit Rumput Laut bagi 40 orang pembudidaya	Kec. Anggrek, Kec. Ponelo Kepulauan Kab Gorontalo Utara, Kec. Popayato Timur, Kec. Popayato Kab. Pohuwato	40 Orang	100.000.000	APBD			
	- Pengembangan Kebun Bibit	Terlaksananya Pengembangan Kebun Bibit pada 4 kawasan ( 8 Ha) sebanyak 56 Ton Bibit Rumput Laut	Kec. Anggrek, Kec. Ponelo Kepulauan Kab Gorontalo Utara, Kec. Popayato Timur, Kec. Popayato Kab. Pohuwato	4 Paket	1.000.000.000	APBD			
	- Pengadaan sarana budidaya rumput laut (0,25 ha x 30 paket)	Tersedianya sarana produksi rumput laut di 2 Kawasan Kecamatan seluas 7,5 Ha sebanyak 52,5 Ton Rumput Laut	Kec. Anggrek, Kec. Ponelo Kepulauan Kab Gorontalo Utara	7,5 ha (Rumput Laut 52,5 Ton)	237.500.000	APBD			
	- Pengadaan sarana budidaya rumput laut (0,25 ha x 30 paket)	Tersedianya sarana produksi rumput laut di 2 Kawasan Kecamatan seluas 7,5 Ha sebanyak 52,5 Ton Rumput Laut	Kec. Popayato Timur, Kec. Popayato Kab. Pohuwato	7,5 ha (Rumput Laut 52,5 Ton)	237.500.000	APBD			
	- Pengadaan Benih Ikan Laut	Tersedianya benih Ikan Laut sebanyak 13.000 ekor	Kab. Pohuwato (Kec. Popayato, Kec. Lemito), Kab. Boalemo (Kec. Tilamuta, Kec. Paguat), dan Kab. Gorontalo Utara (Kec. Kwandang, Kec. Ponelo Kepulauan)	13.000 ekor	200.000.000	APBD			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OutComes)/KEGIATAN(Output)	RENCANA TAHUN 2018 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(9)	(10)
	-	Pengadaan pakan ikan Laut	Tersedianya pakan ikan Laut sebanyak 4.8 Ton	Kab. Pohnuato (Kec. Popayato, Kec. Lemito), Kab. Boalemo (Kec. Tilamuta, Kec. Paguat), dan Kab. Gorontalo Utara (Kec. Kwandang, Kec. Pongola Kelautan)	4,8 ton	120.000.000	APBD		
	-	Pendampingan/Pembinaan Kelompok Usaha Budidaya Air Laut	1 (paket) Pendampingan/Pembinaan Kelompok Usaha Budidaya Air Laut di wilayah kab dan koa se Provinsi Gorontalo	Kab./Kota	1 paket	100.000.000	APBD		
	-	Temu Lapang Perikanan Budidaya Air laut	Temu Lapang Budidaya Ikan Air Laut yang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) Kali di Kab. Gorontalo Utara dan kab. Pohnuato	Kab. Gorut dan Pohnuato	3 kali	75.000.000	APBD		
2 05 2 05 01 15	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Meningkatnya rata-rata pendapatan pelaku usaha perikanan (Nelayan Rp. 2.800.000/Bln), (Pembudidaya Rp. 2.700.000/Bln), (Pengolah dan Pemasar Rp. 3.672.000) serta Interfensi 150 Rumah Tanga Miskin di 6 Kecamatan Sasaran	Provinsi Gorontalo	Kawasan Pesisir Perikanan dan Kelautan Terpadu (KP2KT) yang diintervensi (6 Kawasan)	1.870.000.000	APBD		Kawasan Perikanan yang diintervensi (10 Kawasan PPI/TPI)	2.057.000.000
2 05 2 05 01 15	10 Konservasi, Rehabilitasi dan Pengembangan Usaha Garam Rakyat	Terlaksananya rehabilitasi kawasan konservasi perairan daerah. Tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian ekosistem pesisir dan laut dan terlaksananya penzonasian serta pemanfaatan ruang zonasi pesisir dan laut sesuai regulasi perundang-undangan yang berlaku serta berkembangnya produktifitas Garam Rakyat	Kab/kota	1 Perda Zonasi WPSK, 1 Kawasan ecowisata, 3 Kawasan Konservasi (Mangrove, Penyu dan Hiu Paus) serta 2 Ha Lokasi Pugar	1.370.000.000	APBD		1 Kawasan ecowisata, 3 Kawasan Konservasi (Mangrove, Penyu dan Hiu Paus) serta 4 Ha Lokasi Pugar	1.507.000.000
	-	Zonasi Kawasan Pesisir dan Laut untuk Konservasi	Zonasi pada 1 (satu) Kawasan Pesisir dan Laut untuk Konservasi	Provinsi Gorontalo	1 Kawasan	200.000.000	APBD		
	-	Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Peraliran Daerah (RPZKKPD)	1 (satu) Dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Peraliran Daerah (RPZKKPD)	Provinsi Gorontalo	1 Dokumen	200.000.000	APBD		
	-	Pengembangan Ecowisata Mangrove	1 (satu) Kawasan Ecowisata Mangrove di Kab. Pohnuato	Kab. Pohnuato	1 kawasan	200.000.000	APBD		
	-	Konservasi Penyu	1 (satu) Paket Kegiatan Konservasi Penyu	Kab Gorontalo Utara	1 Paket	100.000.000	APBD		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OutComes)/KEGIATAN(Output)	RENCANA TAHUN 2018 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(9)	(10)
	- Pembinaan dan Penguatan Kapasitas Masyarakat sadar Konservasi	2 (dua) Paket Kegiatan Pembinaan dan Penguatan Kapasitas Masyarakat sadar Konservasi	Provinsi Gorontalo	2 Paket	100.000.000	APBD			
	- Pengembangan Program Usaha Garam Rakyat (PUGAR)	1 (satu) Paket Program Pengembangan Program Usaha Garam Rakyat (PUGAR) di Kab. Pohuwato	Kab Pohuwato	1 Paket	200.000.000	APBD			
	- Adi Bakti Mina Bahari	1 (satu) kegiatan Adi Bakti Mina Bahari yang dilaksanakan di Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo	1 Kegiatan	50.000.000	APBD			
	- Konservasi Hiu Paus	1(satu) Paket Kegiatan Konservasi Hiu Paus	Kab Bone Bolango	1 Paket	200.000.000	APBD			
	- Pendampingan/Pembinaan Kelompok Usaha Perikanan Pesisir	Pendampingan/Pembinaan Kelompok Usaha Perikanan ke seluruh wilayah Kabupaten dan Kota (6 Wilayah) se Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo, Kab/Kota	1 Paket	120.000.000	APBD			
2 05 2 05 01 15	11 Pengembangan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Tersusunnya Perda RZWP3K Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo	Dokumen Perda RZWP3K Provinsi Gorontalo	500.000.000	APBD		Pelaksanaan Perda RZWP3K Provinsi Gorontalo	550.000.000
	- Penyusunan Perda RZWP3K	Tersusunnya 1 (satu) Perda RZWP3K	Provinsi Gorontalo	1 Perda	500.000.000	APBD			
2 05 2 05 01 16	Program Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya wilayah perairan bebas illegal fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan	Perairan Teluk Tomini dan Laut Sulawesi	Peningkatan Pelaku Usaha Perikanan 81%	1.361.400.000	APBD		82,23%	1.497.540.000
2 05 2 05 01 16	04 Pemeliharaan Kapal Pengawas dan Speed Pengawas	Beroperasinya kapal pengawasan untuk kegiatan pengawasan; Mendukung pencapaian pengurangan kegiatan illegal fishing di 2 (dua) wilayah perairan Gorontalo (Teluk Tomini dan Laut Sulawesi)	Perairan Teluk Tomini dan Laut Sulawesi	2 unit kapal (Operasional 100%), Mendukung Ketaatan pelaku usaha perikanan 81%	350.000.000	APBD		2 unit kapal (Operasional 100 %), wilayah bebas illegal fishing 81%	385.000.000
	- BBM Kapal Pengawas Perikanan	Operasional Kapal Pengawas yang dilaksanakan di 2 (dua) wilayah perairan Teluk Tomini dan Laut Sulawesi	Perairan Teluk Tomini dan Laut Sulawesi	2 Lokasi	100.000.000	APBD			
	- Pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan	Terlaksananya pemeliharaan kapal pengawas untuk Operasional Kapal Pengawas yang dilaksanakan di 2 (dua) wilayah perairan Teluk Tomini dan Laut Sulawesi	Provinsi Gorontalo	2 Paket	250.000.000	APBD			
2 05 2 05 01 16	09 Pelayanan Administrasi P2SDKP Kapal Pengawas (operasi pengawasan)	Terlaksananya operasional pengawasan dan pendampingan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS)	Provinsi Gorontalo	2 wilayah perairan (Laut Sulawesi dan Teluk Tomini)	1.011.400.000	APBD		2 wilayah perairan (Laut Sulawesi dan Teluk Tomini)	1.112.540.000
	- Operasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Perairan Laut Sulawesi dan Teluk Tomini	Operasi pengawasan di 2 (dua) wilayah Perairan Provinsi Gorontalo (Teluk Tomini dan Laut Sulawesi)	Perairan Teluk Tomini dan Laut Sulawesi	2 (dua) wilayah Perairan (perairan Teluk Tomini dan Perairan Laut Sulawesi)	200.000.000	APBD			
	- Rakor dan konsultasi Pengendalian dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan	4 Kegiatan Rakor dan konsultasi Pengendalian dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Provinsi Gorontalo	5 Kegiatan	200.000.000	APBD			
	- Pendampingan, Identifikasi dan Movev pada POKMASWAS	Pembinaan & pendampingan pada POKMASWAS di 2 (dua) wilayah pengawasan (perairan Teluk Tomini dan Perairan Laut Sulawesi)	Provinsi Gorontalo	2 (dua) wilayah pengawasan (perairan Teluk Tomini dan Perairan Laut Sulawesi)	250.000.000	APBD			
	- Satuan Tugas (Satgas) Terpadu, Pengamanan, Pengawasan SDI	Terlaksananya Program Tim Terpadu, Pengamanan, Pengawasan SDI sebanyak 6 (enam) kawasan di wilayah Provinsi Gorontalo	Kab/Kota	6 Wilayah Kabupaten Kota	100.000.000	APBD			
	- Hari Nusantara Tingkat Nasional dan Provinsi	Pelaksanaan Hari Nusantara sebanyak 2 (dua) kali yaitu Tingkat Nasional dan Provinsi	Provinsi Gorontalo	2 Kegiatan	75.000.000	APBD			
	- Operasional Pos Pengawasan SDKP	3 (tiga) Paket Operasional Pos Pengawasan SDI	Pos Pengawasan Tonga, Gentuma dan Wanggarasi	3 Paket	100.000.000	APBD			
	- Honor ABK / Pengawas SDKP	1 Paket kegiatan peningkatan kapasitas ABK / Pengawas SDKP	Provinsi Gorontalo	1 paket	86.400.000	APBD			
2 05 2 05 01 23	Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Peningkatan Daya Saing usaha dan produk Perikanan serta memperkuat akses pemasaran hasil-hasil perikanan untuk mendukung Sistem Logistik Ikan Nasional	Provinsi Gorontalo	Peningkatan Pendapatan Pengolahan dan Pemasar Rp. 3.672.000/bln dan konsumsi ikan 57,38 kg/kapita/thn	5.740.000.000	APBD		Pendapatan Rp. 3.965.760/bln dan konsumsi ikan 57,95 kg/kapita/thn	6.314.000.000
2 05 2 05 01 23	05 Pengembangan Sentra Pengolahan Hasil Perikanan	Tersedianya pengadaan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di Kawasan Pesisir Perikanan dan Kelautan Terpadu (KP2KT) *Terlaksananya pembinaan/ pendampingan terhadap UMKM /UPI pengolahan hasil perikanan	Provinsi Gorontalo	6 Kab./Kota, 37 Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	1.400.000.000	APBD		6 Kab./Kota, 44 Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	1.540.000.000
	- Peralatan Pengolahan dan Pengemasan bagi pelaku usaha UMKM	1 (satu) Paket Peralatan Pengolahan dan Pengemasan bagi pelaku usaha UMKM	Kabupaten/Kota	1 Paket	200.000.000	APBD			



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OutComes)/KEGIATAN(Output)	RENCANA TAHUN 2018 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(9)	(10)
	- Bimbingan Teknis / Sertifikasi bagi Quality Control (QC) pada UPI dan UMKM	Sertifikasi bagi 21 (dua puluh satu) Quality Control (QC) pada UPI dan UMKM	Provinsi Gorontalo	21 UPI/UMKM	100.000.000	APBD			
	- Pembinaan dan Inhouse Training Peningkatan Nilai Tambah bagi UMKM	Pembinaan dan Inhouse Training Peningkatan Nilai Tambah bagi UMKM di 6 (enam) Lokasi Kabupaten dan Kota	Kabupaten/Kota	6 Lokasi	100.000.000	APBD			
	- Pendampingan/Pembinaan Kelompok Pengolah Hasil Perikanan	Pendampingan/Pembinaan Kelompok Usaha Perikanan ke seluruh wilayah Kabupaten dan Kota (6 Wilayah) se Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo, Kab/Kota	1 Paket	100.000.000	APBD			
	- Pembangunan Pabrik Es	1 (satu) paket Pembangunan Pabrik es Kapasitas 2 Ton di Kab Boalemo	Pabrik Es Kapasitas 2 Ton di Kab Boalemo	1 Paket	400.000.000	APBD			
	- Pengembangan Sentra Pengolahan Produk Rumput Laut	1 (satu) paket Pengembangan Sentra Pengolahan Produk Rumput Laut	Pabrik Pengolahan Rumput Laut	1 Paket	500.000.000	APBD			
2 05 2 05 01 23	06 Penguatan Sistem Informasi Pasar	1. Terlaksananya pembinaan terhadap pedagang pasar ikan melalui identifikasi, monitoring dan evaluasi pasar ikan yang sesuai standar (30 Pasar). 2. terinformasinya harga ikan sebanyak 12 (dua belas ) Bulan penylaran	Provinsi Gorontalo	30 Pasar ikan dan 12 Bulan Informasi Harga Ikan	100.000.000	APBD		35 Pasar Ikan dan 12 Bulan Informasi Harga Ikan	110.000.000
2 05 2 05 01 23	11 Promosi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN)	* Terlaksananya Kegiatan Fish To School - My Fish My Trip dalam rangka kampanye Gemarikan di 3 (tiga) lokasi sebanyak 500 (lima ratus) siswa SD * tersedianya motor bercool box bagi pedagang ikan bersepeda sebanyak 132 (Seratus Tiga Puluh Dua) unit, serta bantuan Sarana Sistim Rantai Dingin cool box bagi pemasar dan pengolah ikan sebanyak 51 (lima puluh satu) unit	Provinsi Gorontalo	* 3 Lokasi kampanye Gemarikan (500 siswa), * 132 motor bercoolbox dan 51 unit Coolbox	3.440.000.000	APBD		* 3 Lokasi kampanye Gemarikan (600 siswa), * 30 motor bercoolbox dan 40 unit Coolbox	3.784.000.000
	Penyediaan Sarana Pemasaran Bergerak Roda 2 Bercoolbox untuk pedagang bersepeda	30 (tiga puluh) unit Sarana Pemasaran Bergerak Roda dua Bercoolbox untuk pedagang bersepeda	Provinsi Gorontalo	100 Unit	2.500.000.000	APBD			
	Pengadaan Sarana Usaha Bagi Pedagang Ikan Pemula	Sarana Usaha Bagi Pedagang Ikan Pemula	Kabupaten/Kota	1 Paket	200.000.000	APBD			
	Kegiatan Fish To School - My Fish My Trip dalam rangka Safari GEMARIKAN	Kegiatan Fish To School - My Fish My Trip dalam rangka Safari GEMARIKAN bagi 1000 (seribu) siswa di 5 (lima) lokasi	Provinsi Gorontalo	1000 Siswa, 5 Kegiatan	500.000.000	APBD			
	Hari Ikan Nasional	Terselenggaranya Hari Ikan Nasional	Provinsi Gorontalo	1 Paket	200.000.000	APBD			
	Facilitasi Pengurusan SIM untuk Pedagang Ikan Bersepeda	Terfasilitasi Pengurusan SIM untuk Pedagang Ikan Bersepeda	Provinsi Gorontalo	1 Paket, 100 Orang	40.000.000	APBD			
2 05 2 05 01 23	4 Pengembangan Peluang Usaha dan Investasi Pasca Panen	Terlaksananya Kegiatan Expo Perikanan 2018 Dalam Rangka Pengembangan Peluang Investasi dan Promosi Di Sektor Perikanan dan Kelautan	Provinsi Gorontalo	1 Kegiatan dan 5 Paket Bazar Perikanan	800.000.000	APBD		1 Kegiatan dan 7 Paket Bazar Perikanan	880.000.000
	Expo Perikanan	1 (satu) Kegiatan Expo Perikanan di dalam dan Luar Daerah	Provinsi Gorontalo	1 kegiatan	200.000.000				
	Pelaksanaan Bazar Mina Gorontalo	6 (enam) Paket pelaksanaan Bazar Mina Gorontalo	Provinsi Gorontalo	6 Paket	600.000.000				
2 05 2 05 01 25	Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan	Tersedianya Data Uji Mutu Ikan yang Dipasarkan dan dikonsumsi	Provinsi Gorontalo		500.000.000				550.000.000
2 05 2 05 01 25	01 Penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	100 (seratus) data uji mutu dan Peningkatan SDM Diversifikasi Olahan dan keamanan Hasil Perikanan sebanyak 150 (seratus lima puluh) pelaku usaha perikanan di Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo	100 data uji dan 150 orang	500.000.000	APBD		Tersedianya data uji mutu ikan yang akan dipasarkan dan di konsumsi ( 100 data uji dan 150 pelaku usaha)	550.000.000
2 05 2 05 01 26	Peningkatan Produksi dan Pelayanan Teknis (UPTD BBIP)	Meningkatnya produksi benih bermutu untuk mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya	Provinsi Gorontalo	BPBILP (Produksi benih unggul 10 juta benih Ikan/Benur udang	2.000.000.000			BPBILP (Produksi benih unggul 2,5 Juta benih Ikan air laut)	2.200.000.000
2 05 2 05 01 26	01 Peningkatan Produksi dan Pelayanan Teknis	Tersedianya benih unggul 10 juta juta benih Ikan/Benur udang sesuai standar teknis pembenihan	BBIP Desa Lamu Kec Tilamuta Kab. Boalemo	10 Juta benih Ikan/Benur udang	2.000.000.000	APBD		3 Kegiatan	2.200.000.000
2 05 2 05 01 27	Program Pelayanan Pelabuhan Perikanan Tenda	Peningkatan Pelayanan UPTD PPPTU	Provinsi Gorontalo	100% (12 Bulan)	1.100.000.000			100% (12 Bulan)	1.210.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OutComes)/KEGIATAN(Output)	RENCANA TAHUN 2018 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(9)	(10)
2 05 2 05 01 27	01	Penyediaan dan Pelayanan Sarana Produksi Perikanan (UPTD-PPTPU)	Provinsi Gorontalo	12 bulan	1.100.000.000	APBD		12	1.210.000.000
	-	Operasional Pelayanan UPTD PPTPU	Provinsi Gorontalo	12 bulan	300.000.000				
	-	Pembangunan / Rehab Pabrik Es	Pabrik Es Wongarasi Kab Pohuwato dan Pabrik Es Tabulo Kab Boalemo	2 Paket	800.000.000				
2 05 2 05 01 27		Program Pelayanan Pelabuhan Perikanan Gentuma	Provinsi Gorontalo	100% (12 Bulan)	300.000.000			100% (12 Bulan)	330.000.000
2 05 2 05 01 27	01	Penyediaan dan Pelayanan Sarana Produksi Perikanan (UPTD-PP Gentuma)	Provinsi Gorontalo	12 bulan	300.000.000	APBD		12	330.000.000
	-	Operasional Pelayanan UPTD PP Gentuma	Provinsi Gorontalo	12 bulan	300.000.000				
2 05 2 05 01 01		Peningkatan Pelayanan Administrasi, dan SDM Aparatur DPK Prov. Gorontalo.		100% (12 Bulan)	1.911.600.000				6.164.400.000
2 05 2 05 01 01	01	Pelayanan administrasi perkantoran	Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo	100% (12 Bulan)	1.650.000.000	APBD		100% (12 Bulan)	1.815.000.000
2 05 2 05 01 01	03	Peningkatan SDM Apratur	Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo	20 orang (SDM teknis 5 orang; SDM Perencanaan 5 orang ; SDM Pegelola Keuangan 5 orang dan SDM Kepegawaian 5 orang)	261.600.000	APBD	Penambahan SDM Balai Benih Udang	20 orang (SDM teknis 5 orang; SDM Perencanaan 5 orang ; SDM Pegelola Keuangan 5 orang dan SDM Kepegawaian 5 orang)	287.760.000
2 05 2 05 01 01		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (DPK Prov. Gorontalo.)		100% (12 Bulan)	1.448.400.000				2.468.400.000
2 05 2 05 01 01	02	Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran	Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo	100% (12 Bulan)	1.448.400.000	APBD		100% (12 Bulan)	1.593.240.000
2 05 2 05 01 01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana & Prasarana (UPTD Balai Pengujian, Penerapan Mutu, dan Diversifikasi Produk Perikanan)	Provinsi Gorontalo	12 Bulan, 100 %	531.600.000			12 Bulan, 100 %	584.760.000
2 05 2 05 01 01	04	Pelayanan administrasi UPTD Balai Pengujian, Penerapan Mutu, dan Diversifikasi Produk Perikanan	UPTD-Balai Pengujian, Penerapan Mutu, dan Diversifikasi Produk Perikanan DPK Provinsi Gorontalo	100% (12 Bulan)	264.000.000	APBD		100% (12 Bulan)	290.400.000
2 05 2 05 01 01	05	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD Balai Pengujian, Penerapan Mutu, dan Diversifikasi Produk Perikanan)	UPTD-Balai Pengujian, Penerapan Mutu, dan Diversifikasi Produk Perikanan DPK Provinsi Gorontalo	100% (12 Bulan)	267.600.000	APBD		100% (12 Bulan)	294.360.000
2 05 2 05 01 01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana & Prasarana pada UPTD Pelabuhan Perikanan Tenda dan Pelayanan Usaha (PPTPU)	Provinsi Gorontalo	12 Bulan, 100 %	840.000.000			12 Bulan, 100 %	726.000.000
2 05 2 05 01 01	06	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD PPTPU)	UPTD PPTPU DPK Provinsi Gorontalo	100% (12 Bulan)	660.000.000	APBD		100% (12 Bulan)	726.000.000
2 05 2 05 01 01	07	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD PPTPU)	UPTD PPTPU DPK Provinsi Gorontalo	100% (12 Bulan)	180.000.000	APBD			
2 05 2 05 01 01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana & Prasarana UPTD Pelabuhan Perikanan Gentuma (PPG)	Provinsi Gorontalo	12 Bulan, 100 %	500.000.000			12 Bulan, 100 %	330.000.000
2 05 2 05 01 01	08	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD PPG)	UPTD PPG DPK Provinsi Gorontalo	100% (12 Bulan)	300.000.000	APBD		100% (12 Bulan)	330.000.000
2 05 2 05 01 01	09	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD PPG)	UPTD PPGPU DPK Provinsi Gorontalo	100% (12 Bulan)	200.000.000	APBD			

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OutComes)/KEGIATAN(Output)	RENCANA TAHUN 2018 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(9)	(10)
2 05 2 05 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana & Prasarana (UPTD Pengawasan dan Konservasi)	Presentase peningkatan pelayanan Jasa Administrasi, Sarana prasarana UPTD Pengawasan dan Konservasi	Provinsi Gorontalo	12 Bulan, 100 %	848.000.000	s		12 Bulan, 100 %	932.800.000
2 05 2 05 01 01	10 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD )	Pelayanan administrasi UPTD Pengawasan dan Konservasi selama 12 (dua belas) bulan	UPTD Pengawasan dan Konservasi DKP Provinsi Gorontalo	100% (12 Bulan)	648.000.000	APBD		100% (12 Bulan)	712.800.000
2 05 2 05 01 01	11 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD Pengawasan dan Konservasi)	Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran UPTD Pengawasan dan Konservasi selama 12 (dua belas) bulan	UPTD Pengawasan dan Konservasi DKP Provinsi Gorontalo	100% (12 Bulan)	200.000.000	APBD		100% (12 Bulan)	220.000.000
2 05 2 05 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana & Prasarana (UPTD Balai Budidaya Perikanan)	Presentase peningkatan pelayanan Jasa Administrasi, Sarana prasarana UPTD Balai Budidaya Perikanan	Provinsi Gorontalo	12 Bulan, 100 %	3.046.000.000			12 Bulan, 100 %	3.350.600.000
2 05 2 05 01 01	12 Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran (UPTD Balai Budidaya Perikanan)	Tersedianya pelayanan administrasi UPTD Balai Budidaya Perikanan	UPTD Balai Budidaya Perikanan DKP Provinsi Gorontalo	100% (12 Bulan)	546.000.000	APBD		100% (12 Bulan)	600.600.000
2 05 2 05 01 01	13 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (UPTD Balai Budidaya Perikanan)	Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana perkantoran UPTD Balai Budidaya Perikanan	UPTD BPBILP/BBU DKP Provinsi Gorontalo	100% (12 Bulan)	2.500.000.000	APBD		100% (12 Bulan)	2.750.000.000
2 05 2 05 01 01	Program Peningkatan Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan	Peningkatan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Keuangan	Provinsi Gorontalo	100% (12 bulan)	1.294.800.000			100% (12 bulan)	1.254.000.000
2 05 2 05 01 01	01 Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	Terselenggaranya 4 (empat) kegiatan perencanaan ; Tersedianya dokumen perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan ; kegiatan operasional untuk menunjang perencanaan dan money serta membangun/peningkatan sistem informasi perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo	4 kegiatan perencanaan (Penyusunan rencana kerja/renja 2018 ; Sinkronisasi Program/kegiatan ; Rakor data ;Money terpadu) ; Operasional perencanaan dan Money selama 12 bulan dan 10 dokumen ; sistem informasi perikanan & kelautan	1.140.000.000	APBD		4 kegiatan perencanaan (Penyusunan rencana kerja/renja 2019 ; Sinkronisasi Program/kegiatan ; Rakor data ;Money terpadu) ; Operasional perencanaan dan Money selama 12 bulan dan 10 dokumen	1.254.000.000
2 05 2 05 01 01	02 Penyelenggaraan Keuangan SKPD	Terselenggaranya kegiatan penyelenggaraan keuangan dan Tersedianya dokumen keuangan SKPD selama 12 (dua belas) bulan	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo	100 % (12 bulan) dan 2 Dokumen pelaporan keuangan	154.800.000	APBD		100 % (12 bulan) dan 2 Dokumen pelaporan keuangan	170.280.000
		TOTAL			47.860.800.000				56.995.400.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OutComes)/KEGIATAN(Output)	RENCANA TAHUN 2018 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

REKAPAN USULAN ANGGARAN APBD DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN TA. 2018

NO	Nama Program	Jumlah Usulan Anggaran 2018 (Rp)	
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Tangkap	20.494.500.000	42,82
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya	4.374.500.000	9,14
3	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	1.870.000.000	3,91
4	Program Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1.361.400.000	2,84
5	Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	5.740.000.000	11,99
6	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana & Prasarana (UPTD Balai Pengujian, Penerapan Mu	531.600.000	
7	Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan	500.000.000	
	Jumlah (6 + 7)	1.031.600.000	2,16
9	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, sarana & Prasarana (UPTD Pengawasan dan Konservasi)	848.000.000	
	Jumlah (8 + 9)	848.000.000	1,77
10	Peningkatan Produksi dan Pelayanan Teknis (UPTD BBIP)	2.000.000.000	
11	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, sarana & Prasarana (UPTD BPBILP)	3.046.000.000	6,36
	Jumlah (10 + 11)	5.046.000.000	10,54
12	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, sarana & Prasarana (UPTD PPTPU)	840.000.000	1,76
13	Program Pelayanan Pelabuhan Perikanan Tenda	1.100.000.000	2,30
14	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, sarana & Prasarana (UPTD PPGPU)	500.000.000	1,04
15	Peningkatan Pelayanan Administrasi, dan SDM Aparatur DPK Prov. Gorontalo.	1.911.600.000	3,99
16	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (DPK Prov. Gorontalo.)	1.448.400.000	3,03
		3.360.000.000	7,02
17	Program Peningkatan Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan	1.294.800.000	2,71
	<b>TOTAL USULAN ANGGARAN 2018</b>	<b>47.860.800.000</b>	<b>100</b>